



PROSIDING

2024



FOCUS GROUP DISCUSSION

**"MEMBANGUN PARIWISATA BERPERSPEKTIF KEBUDAYAAN
DALAM RANGKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN"**

RUTENG, 12 JANUARI 2024



PROSIDING

2024



FOCUS GROUP DISCUSSION

**"MEMBANGUN PARIWISATA BERPERSPEKTIF KEBUDAYAAN
DALAM RANGKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPAWISETAAN"**

RUTENG, 12 JANUARI 2024



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”

TIM PENYUSUN PROSIDING

“FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

**“MEMBANGUN PARIWISATA BERPERSPEKTIF KEBUDAYAAN
DALAM RANGKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10**

TAHUN 2009

TENTANG KEPAWISETAAN”

RUTENG, 12 JANUARI 2024

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab : Ricko Wahyudi, S.H., M.H.

Ketua : Kuntari, S.H., M.H.

Anggota : Atisa Praharini, S.H, M.H.
Arrista Trimaya, S.H., M.H.
Laksmi Harundani, S.H, M.Kn.
Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung,
S.H., M.H.

Pendukung : Administrasi Badan Keahlian DPR RI

BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA PUSAT
10270
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya *Focus Group Discussion “Membangun Pariwisata Berperspektif Kebudayaan dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.”* Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng yang dihadiri oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran, civitas akademika Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, dan *stakeholder* di bidang kepariwisataan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada peserta FGD yang telah berkenan mengikuti FGD secara fisik.

Selain itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding mengenai *“Membangun Pariwisata Berperspektif Kebudayaan dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan”*. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan.

Jakarta, 22 Maret 2024

Kepala Badan Keahlian DPR RI,
TTD.

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

DAFTAR ISI

<i>TIM PENYUSUN PROSIDING</i>	3
<i>KATA PENGANTAR.....</i>	5
<i>DAFTAR ISI</i>	6
<i>SAMBUTAN.....</i>	7
<i>KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI.....</i>	7
<i>Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.</i>	12
A. PAPARAN DAN MATERI NARASUMBER	13
<i>Kuntari, S.H., M.H.....</i>	13
<i>Prof. Dr. Yohannes Servatius Lon., M.A</i>	43
<i>Dr. Maksimus Regus, S.Fil., M.Si</i>	56
<i>Dr. Frans Teguh MA., CHE</i>	69
<i>Dr. Inosensius Sutam</i>	86
B. SESI TANYA JAWAB.....	118
C. DOKUMENTASI KEGIATAN	123

**SAMBUTAN
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

**“MEMBANGUN PARIWISATA BERPERSPEKTIF KEBUDAYAAN
DALAM RANGKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2009
TENTANG KEPAWISETAAN”**



***Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.***

1. Yth. Bapak Dr. Maksimus Regus, S.Fil, M.Si (Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus);
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, LIC., M.A (Akademisi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus);
3. Yth. Bapak Dr. Inosensius Sutam (Akademisi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus)
4. Yth. Bapak Rudolof Ngalu, S.FIL., M.PD (Akademisi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus)
5. Yth. Bapak Dr. Frans Teguh, MA. (Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);
6. Yth. Kuntari, S.H., M.H. (Tim Penyusun RUU Kepariwisataan Pusat Perancangan Undang-Undang EkuinbangKesra Badan Keahlian DPR RI);
7. Yth. Bapak Ricko Wahyudi, S.H., M.H, (Plh. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang EkOnomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI);
dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti acara pada siang hari ini, yakni *Focus Group Discussion* mengenai "Membangun Pariwisata Berperspektif Kebudayaan Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan"

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Maksimus Regus, S.Fil, M.Si (Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus) dan para narasumber yang telah berkenan untuk berbagi pemikiran dan gagasannya untuk *Focus Group Discussion* ini. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Rudolof Ngalu, S.FIL., M.PD yang akan memandu jalannya kegiatan *Focus Group Discussion* pada hari ini.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memajukan pariwisata sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan dan keragaman budaya, menikmati keindahan alam, mempelajari peninggalan sejarah, mengembangkan kreatifitas manusia, dan memperkokoh hubungan antar bangsa dengan tetap menjaga nilai, adat istiadat, dan warisan budaya yang tetap harus dilindungi dan dihormati.

Penyelenggaraan kepariwisataan selama ini dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada

pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup empat pilar, yaitu industri pariwisata, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat menjadi sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas negara.

Kepariwisataan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Ke depan, pariwisata perlu dipandang sebagai salah satu sektor yang berpengaruh pada kondisi sosio-ekonomi dari pelaku pariwisata, sehingga dalam menghitung dampak atau *multiplier effect* pariwisata tidak lagi hanya mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga semua manfaat sosiologis dan psikologisnya terutama bagi wisatawan selaku konsumen. Begitu pula adanya perkembangan konsep pariwisata berkelanjutan menuntut seluruh pelaku wisata untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap objek atau daya tarik wisata, turut bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan, penciptaan pengalaman berharga selama berwisata, memperpanjang waktu singgah, adaptif

terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pada akhirnya mampu berkolaborasi secara berkelanjutan antarpemangku kepentingan.

Salah satu upaya menjawab berbagai tantangan ke depan tersebut maka diperlukan konvergensi pariwisata dan budaya dimana kebijakan dan kegiatan pariwisata harus dilakukan dengan menghormati warisan seni, arkeologi dan budaya, yang harus dilindungi dan diwariskan kepada generasi mendatang. Konvergensi antara pariwisata dan budaya tersebut akan meningkatkan minat pengunjung dalam pengalaman budaya dan membawa peluang unik dalam berwisata.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Berdasarkan poin-poin penting di atas, Badan Keahlian DPR RI dan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus merasa penting untuk dilakukan *Focus Group Discussion* agar dapat memunculkan diskusi yang membangun yang dapat memberikan pandangan, pendapat, dan sumbangsih pemikiran dari beragam sudut pandang dari sisi akademis mengenai pembangunan pariwisata berprespektif kebudayaan.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabbarakatuh

Oom Santi Santi Santi Oom

Ruteng, 12 Januari 2024

Kepala Badan Keahlian DPR RI,

TTD.

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 196507101990031007

A. PAPARAN DAN MATERI NARASUMBER

Kuntari, S.H., M.H.
(Penyusun RUU tentang Kepariwisataan)

**“Pokok-Pokok Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan dan
Sinergisme Kepariwisataan dengan Kebudayaan”**



PAPARAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Sebelum memulai paparan sebagai pemantik diskusi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri, sebagaimana sudah dibacakan oleh moderator sebelumnya saya Kuntari, S.H., M.H, Perancang PUU Ahli Madya di DPR RI sejak Tahun 2002 sudah terlibat dalam penyusunan NA dan RUU hingga sekarang. Di Tahun 2022 saya ditugaskan oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI sebagai Ketua Tim Penyusunan NA dan RUU tentang Kepariwisataan, dan saat ini NA dan RUU tentang Kepariwisataan sedang disempurnakan secara intensif di Komisi X dengan Ketua Panja Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.

Paparan dengan judul “Pokok-Pokok Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan Dan Sinergisme Kepariwisataan dengan Kebudayaan” ini saya pilih sesuai arahan Ibu Ketua Panja yang menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk lebih mendalami bagaimana mengintegrasikan aspek budaya dalam upaya revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Bapak, Ibu, dan Adik-Adik Mahasiswa sekalian,

Izinkan saya menampilkan gambar salah satu objek wisata di Kabupaten Ruteng yang sedang viral sebagai berikut yaitu “Lodok Meler” atau sawah berpola jaring laba-laba / spider web. Mencermati gambar tersebut apakah menurut Bapak Ibu sekalian merupakan objek wisata yang asli sebagai hasil budaya masyarakat Ruteng atau objek wisata buatan yang sengaja dibuat untuk menarik wisatawan? Ternyata berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang saya lakukan ada dua hal yang menjadi temuan penting,

pertama masih ada anggapan berbeda atas objek wisata tersebut antara asli hasil budaya atau hanya buatan semata. Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai belum dapat mengelola dengan baik kawasan objek wisata tersebut karena masih belum ada kesepahaman dengan masyarakat sekitar. Potret ini banyak terjadi dan dialami oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam upaya mengelola suatu objek wisata sebagai hasil budaya masyarakat di wilayahnya.

Paparan ini diawali dengan struktur materi pembahasan yang terdiri dari pendahuluan, perkembangan penyusunan RUU, sinergisme kepariwisataan dengan kebudayaan, dan penutup.

Pendahuluan

Bapak Ibu dan Adik-Adik Mahasiswa, pastinya sering mendengar adanya ungkapan: *No Culture, No Tourism*.

Secara faktual, pola konektivitas budaya dan pariwisata adalah fenomena yang kompleks dan dinamis, dengan potensi positif besar jika dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menghargai budaya lokal, pariwisata dapat menjadi kekuatan positif dalam memperkaya masyarakat dan melestarikan keberagaman budaya di seluruh dunia.

Dalam gejolak perubahan global yang cepat, interkoneksi global dan peningkatan mobilitas, kebudayaan sebagai sesuatu yang makna pada dunia, mempertahankan keunggulannya, bukan sebagai sesuatu yang membeku dalam ruang dan waktu, namun sebagai sesuatu yang juga berubah untuk memenuhi kebutuhan

manusia. Melalui perjalanan dan pariwisata kita menjumpai keragaman dan dinamika budaya, beserta warisannya baik dalam bentuk material (wujud) maupun immaterial (tak berwujud).

Fakta berikutnya, Indonesia memiliki kekayaan dan warisan budaya yang perlu dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata unggulan. Kita perlu untuk membangun dan mengembangkan identitas pariwisata yang berbasis kepada budaya bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya.

Perkembangan Penyusunan RUU

NA dan RUU tentang Kepariwisataan telah kami susun dan dipresentasikan di Komisi 10 pada tanggal 4 Juli 2022 selanjutnya Tim Pendamping Badan Keahlian DPR RI bersama Komisi X dan Kemenparekraf melakukan berbagai diskusi dan dengar pendapat dengan para pakar, dan salah satunya adalah yang kita lakukan hari ini yaitu FGD dengan akademisi di Universitas Katolik Santu Paulus Ruteng.

Selain itu, kami juga telah melakukan studi banding dan studi literasi mengenai pengelolaan kepariwisataan di negara lain sebagai berikut:

1. Turki

Di Negara Turki, setiap pelaku atau perusahaan pariwisata wajib mendapatkan sertifikat pariwisata, salah satu kegunaannya ialah untuk memudahkan pengawasan, pembinaan, dan syarat mendapatkan insentif. Selanjutnya,

pelaku pariwisata atau investor yang memegang sertifikat pariwisata selama periode investasi harus melaporkan kepada Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki dua kali setahun mengenai kemajuan investasi mereka. Selain itu, perusahaan yang memegang sertifikat pariwisata harus menyerahkan data yang akan digunakan sebagai data statistik pariwisata Turki kepada Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki setiap tiga bulan.

Turki memiliki **UU Kepariwisataan** yang mengatur sektor pariwisata, termasuk definisi budaya, pelestarian pariwisata, daerah pengembangan, kawasan pariwisata, pusat pariwisata dan sarana pendirian, pengembangan, pusat, bentuk dukungan, regulasi, inspeksi investasi dan fasilitas pariwisata.

Dalam penentuan pelestarian budaya pariwisata, daerah pengembangan, dan kawasan pariwisata dan pusat pariwisata, regulasi **UU Kepariwisataan** mempertimbangkan aspek aset pariwisata alam, sejarah, arkeologi dan sosial budaya negara, potensi musim dingin, perburuan dan olahraga air, pariwisata kesehatan dan jenis pariwisata lainnya.

2. Vietnam

Negara Vietnam memiliki **UU Kepariwisataan** yang ruang lingkup utamanya mengatur sumber daya dan kegiatan pariwisata, hak dan kewajiban wisatawan, organisasi dan individu yang melakukan bisnis pariwisata, dan organisasi serta individu lain yang terlibat dalam kegiatan wisata. Adapun prinsip pengembangan pariwisata **negara Vietnam** untuk

memastikan keselarasan antara pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan, mengembangkan wisata budaya dan sejarah serta ekowisata di daerah prioritas dan utama, dan melestarikan, memperindah, dan mempromosikan nilai-nilai sumber daya pariwisata.

Dalam hal pelibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata, negara Vietnam memberikan ruang partisipasi dan dukungan berinvestasi dalam pengembangan pariwisata, restorasi dan promosi berbagai budaya tradisional, seni cerita rakyat, kerajinan tangan, dan produksi barang-barang lokal untuk melayani wisatawan. Hal tersebut akan berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan material dan spiritual penduduk setempat.

3. Thailand

Menurut Poltekpar Medan, di Thailand penelitian Songserm dan Wisansing (2013) menunjukkan bagaimana pariwisata budaya dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat setempat dan menggunakan pendekatan apresiatif mengembangkan perspektif akar rumput baru yang dapat dibagikan dengan sektor pariwisata. Songserm dan Wisansing dapat mulai mengidentifikasi elemen-elemen penting dari keberlanjutan wisata budaya, yang dapat dirangkum dalam definisi kerja berikut: **pariwisata budaya berkelanjutan berbasis komunitas** melibatkan pemanfaatan benda-benda nyata dan

sumber daya budaya tak benda dalam rangka menunjang kebudayaan, sosial dan vitalitas ekonomi masyarakat setempat, menciptakan kesepahaman antarpemangku kepentingan, sehingga memfasilitasi penyediaan pengalaman otentik dan menarik untuk pengunjung.

Selama penyusunan RUU terdapat beberapa kali perubahan sistematika RUU, adapun perbandingan sistematika RUU dapat dilihat antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, RUU tentang Kepariwisataan (draf per tanggal 4 Juli 2022) yang meniadakan Bab Ketentuan Pidana, dan RUU tentang Kepariwisataan (draf per tanggal 12 Juli 2023) yang menambahkan Bab tentang Riset, Perencanaan, dan Pendidikan Kepariwisataan; Destinasi Pariwisata; Industri Pariwisata; Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal; Badan Pariwisata Indonesia; Asosiasi Kepariwisataan; Diplomasi Budaya; serta Pemasaran Pariwisata.

Penguatan substansi budaya yang terdapat di dalam RUU diantaranya:

1. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, antara lain:
 - a. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, adat istiadat, nilai budaya, dan nilai sejarah;
 - b. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
 - c. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan; dan
 - d. menumbuhkan budaya berwisata.

2. Tujuan Penyelenggaraan Kepariwisataan, antara lain:
 - a. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman; dan
 - b. mengembangkan warisan budaya dan kearifan lokal sebagai lokomotif peningkatan perekonomian rakyat.
3. Diplomasi Budaya

Upaya mengenalkan Indonesia di luar negeri melalui instrumen budaya dengan tujuan memperkuat nilai dan citra positif Indonesia, melalui kegiatan pemasaran, penjenamaan, dan promosi pariwisata dengan pemanfaatan budaya, dalam bentuk pusat budaya dan pariwisata, pertukaran budaya, pameran, pemanfaatan industri kreatif, pengembangan gastronomi, penguatan peran media, dan/atau kerja sama antarnegara dalam bidang pariwisata

4. Kepariwisataan Berbasis Masyarakat Lokal

Masyarakat dapat membentuk destinasi pariwisata berbasis masyarakat lokal berbentuk desa wisata yang memiliki kriteria:

- a. daya tarik wisata yang otentik dan menarik;
- b. masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan; dan
- c. ketersediaan infrastruktur bagi pengunjung yang sesuai dengan kearifan lokal.

5. Kawasan Penyangga

- a. Pembangunan pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dalam kawasan geografis dengan

- memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan kawasan penyanga yang terletak di sekitar destinasi kawasan pariwisata.
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang membangun dan mengembangkan kawasan penyanga.
6. Sinkronisasi Perencanaan
 - a. Rencana induk pembangunan **kepariwisataan** nasional harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPN dan RPJMN.
 - b. Rencana induk pembangunan **kepariwisataan** provinsi dan rencana induk pembangunan **kepariwisataan** kabupaten/kota harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPD dan RPJMD.

Sinergisme Kepariwisataan dengan Kebudayaan

Terwujudnya sinergisme kepariwisataan dan budaya sepakat menjadi mimpi Presiden, Menteri, DPR, adalah mimpi rakyat yang sejalan dengan visi bernegara. Kemeparekraf memiliki mimpi besar bahwa sektor pariwisata harus sustainable dan inklusif serta menjadi penyumbang ekonomi negara yang besar. Sektor pariwisata juga harus mampu menjaga identitasnya, tangguh, mampu berkompetisi secara global, dan membangun *system thinking*.

Dari pendapat akademisi sebagai pakar diperoleh berbagai konsep pemikiran yaitu:

1. Prof Wiendu

Memaknai *no culture, no tourism* yaitu penyelenggaraan kepariwisataan berkontribusi secara signifikan terhadap pelestarian budaya

Keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan perlu diselenggarakan secara sinergi dan terpadu, di satu sisi kepariwisataan harus fokus dalam memanfaatkan sekaligus menjaga kelestarian seluruh potensi yang ada, baik potensi budaya maupun keindahan alam. Di sisi lain, kepariwisataan harus mampu berperan dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Nilai-nilai keseimbangan, sinergitas, dan keberlanjutan dua sisi tersebut menjadi titik ukur dalam membangun peradaban sektor kepariwisataan Indonesia ke depan.

Indikator mengukur pariwisata berkualitas, terutama:

- a. pembelanjaan wisatawan per penduduk dalam suatu destinasi;
- b. kualitas hidup penduduk lokal/masyarakat;
- c. tingkat kepuasan wisatawan (surveyi kepuasan);
- d. peringkat destinasi pariwisata secara eksternal; dan
- e. audit internal suatu destinasi.

Visi pariwisata Indonesia kedepan (Tahun 2034) menjadikan pariwisata Indonesia sebagai:

- a. penghasil devisa negara terbesar sebagai pengganti dari sektor: minyak dan gas; aneka tambang; kelapa sawit dan hasil hutan;

- b. penyerap tenaga kerja berkualitas yang sangat efektif;
 - c. alat pemersatu bangsa dan penguatan identitas nusantara serta memupuk rasa cintah tanah air; dan
 - d. instrumen pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bisa sangat cepat dan tepat sampai kepada masyarakat.
2. Dr. Myra

Paradigma pembangunan kepariwisataan secara umum sudah perlu bergeser dari paradigma pertumbuhan → perkembangan/tidak sekedar tumbuh secara kuantitatif tetapi kualitatif menuju pembangunan bertumpu/berpusat kepada masyarakat dan berkelanjutan untuk mencapai kualitas hidup.

Perubahan paradigma pembangunan menuju kepada pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat, mendorong keberpihakan dalam bentuk:

- a. masyarakat/penduduk sebagai wisatawan – bagian dari pengejawantahan bahwa pariwisata merupakan bagian dari kebutuhan manusia, perilaku sosial dan bagian dari HAM;
- b. masyarakat sebagai tuan rumah yang harus menjaga diri dan dihormati oleh para pengunjung: wisatawan maupun pelancong;
- c. masyarakat sebagai pekerja di berbagai sektor pendukung pariwisata → *Green Jobs & Decent Work*; dan

- d. masyarakat sebagai pengusaha— keberpihakan bagi masyarakat Indonesia untuk mengusahakan dan memiliki berbagai jenis usaha penunjang pariwisata.

Dari aspek pertumbuhan, pariwisata perlu dilihat tidak hanya sebagai pundi ekonomi tetapi juga dari berbagai segi pandang lainnya yaitu, pariwisata nusantara sebagai pemersatu bangsa, jati diri, pariwisata sebagai ‘perantara’ untuk pelestarian lingkungan dan pemajuan kebudayaan, bukan sekedar pemanfaat alam dan budaya, pariwisata dalam kaitannya dengan wawasan nusantara dan pulau-pulau terdepan, dan pariwisata bahari sejogyanaya menjadi pilihan pembangunan kepariwisataan Indonesia.

Pariwisata berkualitas bercirikan:

- a. *Experiencing Completely Immersive Kind of Tourism;*
 - b. *Learning New Life-Changing Philosophies from the locals;*
 - c. *Contribute to the Sustainability of Local Community;*
 - d. *Being an Important Part in Environmental Preservation;*
 - e. *Finding Many New Hidden Gems on the Destinations; and*
 - f. *Avoiding Larger Crowds for Better Enjoyments.*
3. BAPPENAS

Bappenas menginformasikan bahwa arus utama pembangunan kepariwisataan telah berubah dari *sustainable tourism* menuju *regenerative tourism*.

Pariwisata berkelanjutan dimaknai sebagai pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial

dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat lokal.

Pariwisata regeneratif memiliki tujuan utama adalah pengunjung memberikan dampak positif pada tempat wisata dan meninggalkan dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Konsep ini bertujuan untuk secara aktif merevitalisasi dan meregenerasi, menghasilkan siklus dampak positif pada masyarakat dan ekonomi lokal: regenerasi berkelanjutan.

Sejak Tahun 2005 kepariwisataan mengalami perkembangan signifikan salah satunya dalam aspek diversifikasi dan pemerataan destinasi pariwisata melalui salah satunya pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi baru yang tentunya akan berdampak pada wilayah penyangganya termasuk Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai.

Sebagai landasan transformasi: ketahanan sosial, budaya, dan ekologi dalam satu kesatuan, maka pariwisata harus memperhatikan kemajuan kebudayaan, kelestarian lingkungan, serta ketahanan terhadap bencana.

Pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2025-2045 melalui transformasi multi-sektoral yaitu ekonomi, sosial, dan tata kelola dengan tetap memperhatikan kemajuan kebudayaan dan kelestarian lingkungan, serta ketahanan terhadap bencana.

4. Rapat Dengar Pendapat Umum PANJA RUU Kepariwisataan Komisi X, Selasa 28 November 2023 Pola Konektifitas Budaya dan Pariwisata.
 - a. Poltekpar Medan menjelaskan model pariwisata berkelanjutan berupa *triangular partnership*: pariwisata, budaya, dan masyarakat/komunitas. Pariwisata, kebudayaan, dan komunitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena budaya memberikan makna penting untuk mendukung komunitas dan komunitas pada gilirannya menjawai dan mereproduksi budaya. Pariwisata juga mendukung kebudayaan dengan menghasilkan dukungan ekonomi dan budaya menyediakan konten penting untuk pariwisata. Masyarakat lokal juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan pariwisata melalui penyediaan kegiatan yang melekat secara lokal, dan pariwisata mendukung komunitas lokal secara ekonomi. Dalam hal ini terdapat hubungan segitiga yang berkelanjutan antara pariwisata, budaya dan komunitas yang berpotensi memastikan bahwa ketiga bidang tersebut mendapat manfaat. Model ini dikaitkan dengan juga menekankan fakta bahwa hubungan antara ketiganya mendasar unsur-unsur sistem bersifat dinamis dan saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satu perubahan paling signifikan terkini, misalnya, adalah peralihan dari model wisata budaya tradisional berdasarkan warisan nyata menuju

lebih inklusif yakni model yang mencakup lebih banyak elemen budaya tak berwujud dan budaya ‘sehari-hari’. Pariwisata adalah sangat penting dalam hal ini, karena tren saat ini bagi wisatawan untuk meminta lebih banyak pengalaman ‘lokal’ dan mampu ‘hidup seperti warga lokal’.

- b. Poltekpar Makassar mengungkapkan adanya konvergensi **pariwisata** dan **budaya** “Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus dilakukan dengan menghormati warisan seni, arkeologi dan budaya, yang harus mereka lindungi dan wariskan kepada generasi mendatang; **perhatian khusus** harus dicurahkan untuk melestarikan monumen, situs ibadah, situs arkeologi dan bersejarah serta meningkatkan museum yang harus terbuka luas dan dapat diakses oleh kunjungan pariwisata”. Konvergensi antara pariwisata dan budaya, dan meningkatnya minat pengunjung dalam pengalaman budaya, membawa peluang unik tetapi juga tantangan yang kompleks untuk sektor pariwisata.
- c. Politeknik Sahid Jakarta menyatakan bahwa dalam teori sosiologi dan budaya, dikenal Teori Komoditi Appadurai yang menekankan peran perubahan sosial dan budaya dalam perkembangan pariwisata. Pariwisata dianggap sebagai bentuk interaksi antara kelompok budaya yang berbeda. Interaksi ini mencakup pertukaran ide, nilai, dan tradisi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Teori ini menggambarkan pariwisata sebagai sarana untuk pertukaran budaya. Teori ini melibatkan konsep tentang

bagaimana barang-barang atau komoditas memasuki dan memengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Dalam konteks pariwisata, pendekatan ini dapat diaplikasikan pada pemahaman tentang bagaimana objek dan pengalaman pariwisata menjadi komoditas yang dapat dipertukarkan.

Beberapa poin kunci dalam menyimpulkan pola konektivitas budaya dan pariwisata ada tujuh (7) poin yang direkomendasikan sebagai berikut:

1. interaksi timbal balik, hubungan antara pariwisata dan budaya menciptakan interaksi saling memengaruhi, di mana wisatawan sering mencari pengalaman budaya autentik, sementara budaya lokal dapat berkembang melalui interaksi dengan pengunjung;
2. pembentukan identitas lokal, pariwisata berperan dalam mempromosikan dan mempertahankan warisan budaya suatu daerah, dengan identitas lokal yang kuat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman unik;
3. dampak ekonomi dan peluang pekerjaan, pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan signifikan bagi komunitas lokal, dengan industri pariwisata berkelanjutan menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong kegiatan ekonomi lokal, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
4. pertukaran budaya, keberagaman budaya yang dibawa oleh wisatawan menciptakan peluang pertukaran budaya antara

- komunitas lokal dan pengunjung, merangsang inovasi, toleransi, dan pemahaman lintas budaya;
5. tantangan keberlanjutan, peningkatan pariwisata juga membawa tantangan terkait pelestarian budaya dan lingkungan. oleh karena itu, pengembangan model pariwisata yang berkelanjutan, menghormati nilai budaya, dan melibatkan komunitas lokal menjadi penting;
 6. peran pendidikan dan kesadaran, pariwisata berfungsi sebagai alat pendidikan yang efektif, memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk memahami sejarah, tradisi, dan nilai budaya suatu tempat. kesadaran ini dapat mendorong apresiasi terhadap keragaman budaya; dan
 7. pengaruh teknologi dan aksesibilitas, perkembangan teknologi, khususnya dalam konektivitas dan informasi, telah mengubah cara wisatawan berinteraksi dengan budaya. Aksesibilitas informasi dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap warisan budaya.

Penutup

Sebagai penutup dapat disimpulkan 2 hal, *pertama*, penguatan sinergisme pariwisata dan kebudayaan menjadi paradigma baru dalam perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. *Kedua*, penormaan paradigma baru tersebut perlu melibatkan pemangku kepentingan di daerah agar tetap menjaga nilai-nilai budaya di daerah dan sejalan dengan

upaya pengembangan pariwisata berkualitas yang mengutamakan regenerasi berkelanjutan.

Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat dalam memperkaya materi FGD kita hari ini.

*Terima kasih, selamat siang,
Wabillahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

MATERI



PUSAT PUU
EKKUINBANGKESRA

BerAKHLAK  bangga
melontari
bangsa



POKOK-POKOK PENGATURAN RUU TENTANG KEPARIWISATAAN DAN SINERGISME KEPARIWISATAAN DENGAN KEBUDAYAAN

KUNTARI, S.H., M.H.
PENYUSUN RUU TENTANG KEPARIWISATAAN
PUSAT PERANCANGAN UNTAD-UNDANAS, BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI,
PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Ruteng, 12 Januari 2024



PUSAT PUU
EKKUINBANGKESRA

BerAKHLAK  bangga
melontari
bangsa



MATERI PEMBAHASAN

PENDAHULUAN

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN
RUU

SINERGISME KEPARIWISATAAN
DENGAN KEBUDAYAAN

PENUTUP

PENDAHULUAN (1)

📍 NO CULTURE, NO TOURISM?

Fakta

Pola koneksi budaya dan pariwisata adalah fenomena yang kompleks, dinamis, dan potensial. Interkoneksi global dan peningkatan mobilitas, menjadikan kebudayaan bukan sebagai sesuatu yang membeku dalam ruang dan waktu, namun sebagai sesuatu yang juga **BERUBAH** untuk memenuhi kebutuhan manusia.



PENDAHULUAN (2)

Fakta

Indonesia memiliki kekayaan dan warisan budaya yang perlu dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata unggulan

Perlu untuk membangun dan mengembangkan identitas pariwisata yang berbasis kepada budaya bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya.





PUSAT PUU
EKKUINBANGKESRA

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RUU

(1)



Presentasi BKD kepada Komisi X
4 Juli 2022



Diskusi Kelompok Terpumpun
8 Maret 2023



Rapat Teknis
29 Juli 2023



Presentasi Kajian Anggaran
11 September 2023



Konsinyasi
18 September 2023



PUSAT PUU
EKKUINBANGKESRA



- Setiap pelaku atau perusahaan pariwisata wajib mendapatkan sertifikat pariwisata yang selama periode investasi harus melaporkan kepada Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki dua kali setahun mengenai kemajuan investasi mereka. Serta perusahaan tersebut harus menyerahkan data yang akan digunakan sebagai data statistik pariwisata Turki kepada Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki setiap tiga bulan.

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RUU (2) Hasil Studi Banding dan Studi Literasi

Turki

- mempeliki UU kepariwisataan yang mengatur sektor pariwisata, termasuk definisi budaya, pelestarian pariwisata, daerah pengembangan, kawasan pariwisata, pusat pariwisata dan sarana pendirian, pengembangan, pusat, bentuk dukungan, regulasi, inspeksi investasi dan fasilitas pariwisata.
- Dalam penentuan pelestarian budaya pariwisata, daerah pengembangan, dan kawasan pariwisata dan pusat pariwisata, regulasi UU kepariwisataan mempertimbangkan aspek aset pariwisata alam, sejarah, arkeologi dan sosial budaya negara, potensi musim dingin, perburuan dan olahraga air, pariwisata kesehatan dan jenis pariwisata lainnya.

Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki, Law For The Encouragement of Tourism Turkey, Pasal 2, <https://www.ktb.gov.tr/EN-113290/law-for-the-encouragement-of-tourism.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022



- memiliki undang-undang kepariwisataan yang mengatur sumber daya dan kegiatan pariwisata, hak dan kewajiban wisatawan, organisasi dan individu yang melakukan bisnis pariwisata, dan organisasi serta individu lain yang terlibat dalam kegiatan wisata.

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RUU (3)

Hasil Studi Banding dan Studi Literasi

Vietnam

Prinsip pengembangan pariwisata untuk:

- Memastikan keselarasan antara pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan, mengembangkan wisata budaya dan sejarah serta ekowisata di daerah prioritas dan utama, dan melestarikan, memperindah, dan mempromosikan nilai-nilai sumber daya pariwisata;
- Dalam hal pelibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata, Vietnam memberikan ruang partisipasi dan dukungan berinvestasi dalam pengembangan pariwisata, restorasi dan promosi berbagai budaya tradisional, seni cerita rakyat, kerajinan tangan, dan produksi barang-barang lokal.

Undang-Undang Tentang Pariwisata Negara Vietnam (UU No. 44/2005/QH11), Pasal 1, diakses pada tanggal 22 Juni 2022.



- Penelitian Songserm dan Wisansing (2013) menunjukkan bagaimana pariwisata budaya dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat setempat dan menggunakan pendekatan apresiatif mengembangkan perspektif akar rumput baru yang dapat dibagikan dengan sektor pariwisata.

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RUU (4)

Hasil Studi Banding dan Studi Literasi

Thailand

Berdasarkan analisis ini kita dapat mulai mengidentifikasi elemen-elemen penting dari keberlanjutan wisata budaya, yang dapat dirangkum dalam definisi kerja berikut:

Pariwisata budaya berkelanjutan berbasis komunitas melibatkan pemanfaatan benda-bendanya dan sumber daya budaya tak benda dalam rangka menunjang kebudayaan, sosial dan vitalitas ekonomi masyarakat setempat, menciptakan kesepahaman antarpemangku kepentingan, sehingga memfasilitasi penyediaan pengalaman otentik dan menarik untuk pengunjung.

Disampaikan oleh Poltekpar Medan dalam RDPU PANJA RIU Kepariwisataan Komisi X,
Selasa 28 November 2023

Pola Konektifitas Budaya Dan Pariwisata



PUSAT PUU
EKKUINBANGKESRA

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RUU (5)

BerAKHLAK



Perbandingan Sistematika RUU

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	RUU tentang Kepariwisataan (Draf tanggal 4 Juli 2022)	RUU tentang Kepariwisataan (Draf tanggal 12 Juli 2023)
Bab I Ketentuan Umum	Bab I Ketentuan Umum	Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas, Fungsi, dan Tujuan	Bab II Dasar, Asas, Prinsip, dan Tujuan	Bab II dasar, Asas, Prinsip, dan Tujuan
Bab III Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan	Bab III Penyelenggaraan Kepariwisataan	Bab III Penyelenggaraan Kepariwisataan
Bab IV Pembangunan Kepariwisataan	Bab IV Hak dan Kewajiban	Bab IV Hak dan Kewajiban
Bab V Kawasan Strategis	Bab V Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Bab V Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Bab VI Usaha Pariwisata	Bab VI Destinasi Pariwisata	Bab VI Riset, Perencanaan, dan Pendidikan Kepariwisataan
Bab VII Hak, Kewajiban, dan Larangan	Bab VII Industri Pariwisata	Bab VII Destinasi Pariwisata
Bab VIII Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Bab VII Pemasaran Pariwisata	Bab VIII Industri Pariwisata
Bab IX Koordinasi	Bab IX Kelembagaan Pariwisata	Bab IX Sumber Daya Manusia Pariwisata
Bab X Badan Promosi Pariwisata Indonesia	Bab X Desa Wisata dan Kampung Tematik	Bab XI Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal
Bab XI Gabungan Industri Pariwisata Indonesia	Bab XI Kawasan Strategis Pariwisata	Bab XII Badan Pariwisata Indonesia
Bab XII Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, dan Tenaga Kerja	Bab XII Asosiasi Kepariwisataan	Bab XIII Asosiasi Kepariwisataan
Bab XIII Pendanaan	Bab XIII Sumber Daya Manusia Pariwisata	Bab XIV Diplomasi Budaya
Bab XIV Sanksi Administratif	Bab XIV Teknologi dan Informasi Pariwisata	Bab XV Pemasaran Pariwisata
Bab XV Ketentuan Pidana	Bab XV Peran Serta Masyarakat	Bab XVI Kawasan Startegis Pariwisata
Bab XVI Ketentuan Peralihan	Bab XVI Pendanaan Pariwisata	Bab XVII Peran Serta Masyarakat
Bab XVII Ketentuan Penutup	Bab XVII Ketentuan Peralihan	Bab XVIII Pendanaan Pariwisata
	Bab XVIII Ketentuan Penutup	Bab XIX Ketentuan Peralihan
		Bab XX Ketentuan Penutup



PUSAT PUU
EKKUINBANGKESRA

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RUU (5)

Penguatan Budaya dalam RUU

BerAKHLAK



1. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, antara lain:

- a. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, adat istiadat, nilai budaya, dan nilai sejarah
- b. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal
- c. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan
- d. menumbuhkan budaya berwisata

2. Tujuan Penyelenggaraan Kepariwisataan, antara lain:

- a. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman
- b. mengembangkan warisan budaya dan kearifan lokal sebagai lokomotif peningkatan perekonomian rakyat

3. Diplomasi Budaya

upaya mengenalkan Indonesia di luar negeri melalui instrumen budaya dengan tujuan memperkuat nilai dan citra positif Indonesia, melalui kegiatan pemasaran, penjenamaan, dan promosi pariwisata dengan pemanfaatan budaya, dalam bentuk pusat budaya dan pariwisata, pertukaran budaya, pameran, pemanfaatan industri kreatif, pengembangan gastronomi, penguatan peran media, dan/atau kerja sama antarnegara dalam bidang pariwisata



PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RUU (5)

Penguatan Budaya dalam RUU

1. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, antara lain:

- a. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, adat istiadat, nilai budaya, dan nilai sejarah
- b. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal
- c. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan
- d. menumbuhkan budaya berwisata

2. Tujuan Penyelenggaraan Kepariwisataan, antara lain:

- a. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman
- b. mengembangkan warisan budaya dan kearifan lokal sebagai lokomotif peningkatan perekonomian rakyat

3. Diplomasi Budaya

upaya mengenalkan Indonesia di luar negeri melalui instrumen budaya dengan tujuan memperkuat nilai dan citra positif Indonesia, melalui kegiatan pemasaran, penjenamaan, dan promosi pariwisata dengan pemanfaatan budaya, dalam bentuk pusat budaya dan pariwisata, pertukaran budaya, pameran, pemanfaatan industri kreatif, pengembangan gastronomi, penguatan peran media, dan/atau kerja sama antarnegara dalam bidang pariwisata



PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RUU (6)

Penguatan Budaya dalam RUU

4. Kepariwisataan Berbasis Masyarakat Lokal

Masyarakat dapat membentuk Destinasi Pariwisata berbasis masyarakat lokal **berbentuk desa Wisata** yang memiliki kriteria:

- a. daya Tarik wisata yang otentik dan menarik
- b. masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan
- c. ketersediaan infrastruktur bagi pengunjung yang sesuai dengan kearifan lokal.

5. Kawasan Penyangga

- a. Pembangunan pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan kawasan penyangga yang terletak di sekitar destinasi kawasan pariwisata.
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang membangun dan mengembangkan kawasan penyangga.

6. Sinkronisasi Perencanaan

- a. Rencana induk pembangunan Kepariwisataan nasional harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPN dan RPJMN.
- b. Rencana induk pembangunan Kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPD dan RPJMD.

SINERGISME KEPARIWISATAAN DENGAN KEBUDAYAAN

MIMPI BESAR SEKTOR PARIWISATA

The diagram illustrates the synergy between tourism and culture through two paths. A central figure stands at the bottom, looking up a white path that splits into two blue paths. The left path leads to a trophy icon and the text "1. harus sustainable & inclusive". The right path leads to a hand holding a plant icon and the text "2. penyumbang ekonomi negara yang besar : pendapatan negara, devisa dan penciptaan lapangan kerja".

MIMPI BESAR SEKTOR PARIWISATA

SEKTOR PAR HARUS MAMPU :

The diagram lists four requirements for the tourism sector to be successful, represented by a vertical stack of four circles, each with a checkmark:

- 1 menjaga identitasnya
- 2 tangguh
- 3 mampu berkompetisi secara global
- 4 membangun *system thinking*

A small figure of a person holding a pencil is positioned at the bottom of the stack.

MIMPI BESAR SEKTOR PARIWISATA

SEKTOR PAR HARUS MAMPU :

- 1 menjaga identitasnya
- 2 tangguh
- 3 mampu berkompetisi secara global
- 4 membangun **system thinking**



SINERGISME KEPARIWISATAAN DENGAN KEBUDAYAAN (1)



No Culture, No Tourism =

Penyelenggaraan kepariwisataan berkontribusi secara signifikan terhadap pelestarian budaya



Keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan perlu diselenggarakan secara sinergi dan terpadu, di satu sisi kepariwisataan harus fokus dalam memanfaatkan sekaligus menjaga kelestarian seluruh potensi yang ada, baik potensi budaya maupun keindahan alam. Di sisi lain, kepariwisataan harus mampu berperan dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Nilai-nilai keseimbangan, sinergitas, dan keberlanjutan dua sisi tersebut menjadi titik ukur dalam membangun peradaban sektor kepariwisataan Indonesia ke depan.

(Prof. Wiendu Nuryanti, Akademi Departemen Teknik Arsitektur UGM disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpimpin NA dan RRU Kepariwisataan di DPPR RI pada tanggal 08 Maret 2023)

Indikator mengukur pariwisata berkualitas:

1. Pembelanjaan wisatawan per penduduk dalam suatu destinasi
2. Kualitas hidup penduduk lokal/masyarakat
3. Tingkat kepuasan wisatawan (survey kepuasan)
4. Peringkat destinasi pariwisata secara eksternal
5. Audit internal suatu destinasi

Prof. Wiendu Nuryanti, disampaikan dalam Konsinyasi RUU Kepariwisataan di Ayana Hotel pada tanggal 18 September 2023

Konsep Pariwisata Berkualitas

"Pengembangan pariwisata yang menekankan pada komitmen: Keberlanjutan, Bertanggung Jawab, Inklusif, dan Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Sosial Ekonomi Lokal"

Visi pariwisata Indonesia kedepan (Tahun 2034) menjadikan pariwisata Indonesia sebagai:

- a. Penghasil devisa negara terbesar sebagai pengganti dari sektor: minyak dan gas; aneka tambang; kelapa sawit dan hasil hutan
- b. Penyerap tenaga kerja berkualitas yang sangat efektif
- c. Alat pemersatu bangsa dan penguatan identitas nusantara serta memupuk rasa cinta tanah air
- d. Instrumen pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bisa sangat cepat dan tepat sampai kepada masyarakat

Paradigma pembangunan kepariwisataan sudah perlu bergeser dari paradigma pertumbuhan-perkembangan/ tidak sekedar tumbuh secara kuantitatif tp kualitatif menuju pembangunan bertumpu/ berpusat kepada masyarakat dan berkelanjutan untuk mencapai kualitas hidup.

Perubahan paradigma pembangunan menuju kepada pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat, mendorong keberpihakan dalam bentuk:

- Masyarakat/penduduk sebagai wisatawan
- Masyarakat sebagai tuan rumah
- Masyarakat sebagai pekerja
- Masyarakat sebagai pengusaha

Dari aspek pertumbuhan, Pariwisata perlu dilihat tidak hanya sebagai pondasi ekonomi tetapi juga dari berbagai segi pandang lainnya yaitu, **Pariwisata nusantara sebagai pemersatu bangsa, jati diri, Pariwisata sebagai 'perantara' untuk pelestarian lingkungan dan pemajuan kebudayaan, bukan sekedar pemanfaat alam & budaya**. Pariwisata dalam kaitannya dengan wawasan nusantara dan pulau-pulau terdepan, dan Pariwisata bahari sejogoyanya menjadi pilihan pembangunan kepariwisataan Indonesia.

Pariwisata berkualitas bercirikan:

- a. Experiencing Completely Immersive Kind of Tourism,
- b. Learning New Life-Changing Philosophies from the locals,
- c. Contribute to the Sustainability of Local Community,
- d. Being an Important Part in Environmental Preservation,
- e. Finding Many New Hidden Gems on the Destinations, and
- f. Avoiding Larger Crowds for Better Enjoyments.

Dr. Myra P. Gunawan, MT
disampaikan dalam Konsinyasi RUU Kepariwisataan di Ayana Hotel
pada tanggal 18 September 2023

SINERGISME KEpariwisataan DENGAN KEBUDAYAAN (4)



Mainstreaming Sustainable Tourism menuju Regenerative Tourism

Bappenas,
disampaikan dalam Konsinasi RUU Kepariwisataan di Ayana Hotel
pada tanggal 18 September 2023

Sustainable Tourism

Pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat lokal.

Regenerative Tourism

Tujuan utama adalah pengunjung memberikan dampak positif pada tempat wisata dan meninggalkan dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Konsep ini bertujuan untuk secara aktif merevitalisasi dan meregenerasi, menghasilkan siklus dampak positif pada masyarakat dan ekonomi lokal: regenerasi berkelanjutan.

SINERGISME KEpariwisataan DENGAN KEBUDAYAAN (5)

Sejak 2005, sektor pariwisata Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam banyak aspek:



Kontribusi PDB pariwisata

Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendapatan yang dilihat dari sektor pariwisata telah meningkat secara konsisten sejak tahun 2005. Pada tahun 2019, sektor pariwisata menyumbang sekitar 4,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.



Infrastruktur di Destinasi Pariwisata

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dan fokus dalam peningkatan infrastruktur aksesibilitas, konektivitas dan sarpras wisata. Pembangunan bandara baru, pelabuhan, jalan dan jalan tol, dan fasilitas pariwisata lainnya telah dilakukan untuk memfasilitasi pertumbuhan destinasi pariwisata prioritas



Wisatawan Mancanegara dan Devisa Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wanman) ke Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2005. Jumlah kunjungan wisman meningkat menjadi sekitar 16,1 juta (2019) dari 5,0 juta (2005), dengan kontribusi devisa meningkat mencapai 19,7 miliar USD (2019) dari 5,0 miliar USD (2005)



Diversifikasi dan Pemeraata Destinasi Pariwisata

Selain Bali, Jakarta, dan Banten, Indonesia melakukan diversifikasi destinasi pariwisata, misalnya pengembangan destinasi wisata baru seperti Mandalika, Labuan Bajo, Bromo Tengger Semeru, dan Raja Ampat, juga telah mendapatkan hasil pembangunan dan telah meningkat popularitas di kalangan wisatawan. Hal ini didukung dengan pengembangan SDM Pariwisata di destinasi baru

- Prestasi pariwisata Indonesia telah diakui secara internasional. **Peringkat Daya Saing Kepariwisataan Indonesia meningkat dari peringkat 74 (2011) ke peringkat 32 (2021)**, memperbaiki 42 posisi dalam 1 dasawarsa terakhir.
- Peringkat daya saing pariwisata suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti infrastruktur pariwisata, keunikan alam dan budaya, kebijakan dan keberpihakan pemerintah, daya tarik, aksesibilitas, keamanan, kebersihan lingkungan, dan pelayanan wisata (World Economic Forum).
- Bali, sebagai destinasi wisata yang terkenal di Indonesia, beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai tujuan wisata terbaik oleh majalah wisata terkemuka. Selain itu, beberapa situs alam dan budeya Indonesia juga telah masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO.

SINERGISME KEPARIWISATAAN DENGAN KEBUDAYAAN (6)



Pembangunan pariwisata dalam RPJPN 2025-2045 melalui transformasi multi-sektoral yaitu ekonomi, sosial, dan tata kelola dengan tetap memperhatikan kemajuan kebudayaan dan kelestarian lingkungan, serta ketahanan terhadap bencana

SINERGISME KEPARIWISATAAN DENGAN KEBUDAYAAN (7)

Model Pariwisata Berkelanjutan Triangular Partnership



Figure 1: The system of sustainable cultural tourism

Pelopor Medan,
diampaikan dalam RDPU PANJA RUU Kepariwisataan Komisi X, Selasa 28 November 2023

Teori Komoditi Appadurai

- menekankan peran perubahan sosial dan budaya dalam perkembangan pariwisata.
- pariwisata sebagai bentuk interaksi antara kelompok budaya yang berbeda.
- pariwisata sebagai sarana untuk pertukaran budaya.

Tujuh kunci menyimpulkan pola konektivitas budaya dan pariwisata:

1. Interaksi Timbal Balik.
2. Pembentukan Identitas Lokal.
3. Dampak Ekonomi dan Peluang Pekerjaan.
4. Pertukaran Budaya.
5. Tantangan Keberlanjutan.
6. Peran Pendidikan dan Kesadaran.
7. Pengaruh Teknologi dan Aksesibilitas.

Pelopor Medan,
diampaikan dalam RDPU PANJA RUU Kepariwisataan Komisi X, Selasa 28 November 2023.



PENUTUP

1. Penguatan sinergisme pariwisata dan kebudayaan menjadi paradigma baru dalam perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. Penormaan paradigma baru tersebut perlu melibatkan pemangku kepentingan di daerah agar tetap menjaga nilai-nilai budaya di daerah dan sejalan dengan upaya pengembangan pariwisata berkualitas yang mengutamakan regenerasi berkelanjutan.



PUSAT PUU
EKKUINBANGKESRA

BerAKHLAK
#banggabangsa



Sinergisme Kepariwisataan dengan Kebudayaan

TERIMA KASIH

Penyusun RUU tentang Kepariwisataan
Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
Badan Keahlian DPR RI

 puuekra.bkdprri

 PUU Ekra BK DPR RI

 puuekra.bkdprri

Prof. Dr. Yohannes Servatius Lon., M.A
(Akademisi Universitas Katholik Santu Paulus, Ruteng)

**“Pengelolaan Pariwisata Di Daerah Dalam Upaya Pemajuan
Kebudayaan Melalui Perlindungan Nilai Adat dan Aspek
Budaya Setempat”**



PAPARAN

***Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,***

Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Memajukan kebudayaan dalam kegiatan pariwisata merupakan penjabaran dari Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU No. 10 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk memajukan kebudayaan. Dengan kata lain dalam UU No. 10 Tahun 2009 terdapat mandat bahwa penyelenggaraan kepariwisataan untuk melindungi kebudayaan.

Hakekat manusia sebagai makhluk yang berbudaya (*actus humanus*) mempunyai pengertian bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari budaya. Memajukan budaya berarti memajukan peradaban manusia. Karena itu manusia disebut produk kultural, yang dikenal sebagai *actus kontesk* budaya. Dengan adanya kegiatan pariwisata menandakan terjadinya pertemuan budaya yang ditindaklanjuti dengan adanya sikap ketertarikan dan adanya sikap menghargai (*respect*) terhadap kebudayaan.

Sumber daya pariwisata terdiri dari alam, manusia, dan budaya. Dalam hal ini Indonesia sangat kaya dengan sumber daya

alam dan manusia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya. Sumber daya budaya di Indonesia juga sangat unik dan bervariasi. Masing-masing daerah mempunyai corak kebudayaan yang berbeda-beda yang tidak ditemui di wilayah lainnya. Setiap suku bangsa mempunyai ragam budaya yang khas dan mempertahankan kearifan lokal.

Sangat disayangkan jika kita tidak menjaga dan memelihara obyek wisata sebagai warisan budaya bangsa, maka akan menimbulkan dampak negatif pariwisata. Akibat dari dampak negatif pariwisata akan menimbulkan ancamaan bagi eksistensi budaya lokal. Pemerintah juga harus memproteksi budaya lokal dari pengaruh budaya global yang masuk ke Indonesia. Ketika terjadi pengelolaan pariwisata yang tidak profesional juga mengancam keberadaan pariwisata dan budaya lokal.

Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat,

Untuk itu, kita tetap harus menjaga dan melestarikan adat dan budaya warisan para leluhur. Khusus di Kabupaten Manggarai terdapat nilai adat masyarakat Kabupaten Manggarai. Dengan demikian tanggung jawab pengelolaan pariwisata di daerah diambil dan berdasarkan nilai-nilai pariwisata yang ada di daerah tersebut. Daerah pengelolaan pariwisata yang sudah baik yaitu di Bali dan Yogyakarta. Sedangkan pengelolaan yang belum maksimal yaitu di Nusa Tenggara Timur. Yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan kepariwisataan akan sukses bila terdapat profesionalitas dari pihak pengelolaan pariwisata. Kesuksesan dalam pengelolaan pariwisata

juga akan berhasil apabila terdapat sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat.

Bentuk komitmen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk memajukan pariwisata yaitu:

- a. menyusun komitmen Pemerintah dalam bidang juridis, politis, dan finansial;
- b. mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai perlindungan adat dan budaya yang substansinya memuat upaya perindungan nilai adat dan perlindungan budaya lokal;
- c. melestarikan lembaga adat; dan
- d. membuat program pemberdayaan desa adat dan sumber daya manusia yang terlibat.

Untuk menunjang agar pembangunan pariwisata dapat menjadi maju, selain adanya komitmen dan peran dari pemerintah, perlu juga terdapat keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini perlu ada komitmen dari pelaku wisata, hotel, restoran, transportasi, petugas keamanan (satpam), profesional, dan memahami budaya lokal. Selain itu, perlu adanya komitmen dari masyarakat untuk menjaga dan memelihara tempat-tempat wisata.

Dengan demikian, perubahan UU No. 10 Tahun 2009 akan menjadi komprehensif jika memuat pencantuman pengakuan akan keberadaan budaya setempat (yang memuat nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal). Selain itu perlu ada sinergi dan komitmen dari peran masyarakat adatnya. Peran Pemerintah dan pelaku wisata sangat diperlukan untuk melindungi nilai adat dan budaya lokal setempat.

Demikian paparan dari saya, untuk kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabbarakatuh

Shalom

MATERI

PENGELOLAAN PARIWISATA DI DAERAH DALAM UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELALUI PERLINDUNGAN NILAI ADAT DAN ASPEK BUDAYA SETEMPAT



SALAM DAN APRESIASI



- **SELAMAT PAGI**
- Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr Inosentius Samsul Bersama jajarannya di Sekretariat DPR RI Badan Keahlian DPR RI
- Tema dan subtema ini sangat strategis dan relevan namun sangat menantang.
- Peduli dan prihatin dengan pariwisata di wilayah ini



PARIWISATA DAN PERLINDUNGAN NILAI ADAT DAN ASPEK BUDAYA SETEMPAT

Mandat undang-undang

No. 10 tahun 2009:

pariwisata yang
melindungi kebudayaan



**PARIWISATA: ACTUS
HUMANUS.
MANUSIA: PRODUK
KULTURAL,
ACTUS KONTEKS
BUDAYA**



**PARIWISATA:
PERTEMUAN
BUDAYA,
SIKAP TERTARIK,
RESPEK, PENGARUH**



**SUMBERDAYA
PARIWISATA:
ALAM,
MANUSIA,
BUDAYA**



INDONESIA KAYA SUMBER DAYA BUDAYA: UNIK, BERVARIASI



DAMPAK NEGATIF PARIWISATA: BUDAYA LOKAL, BUDAYA GLOBAL



NILAI ADAT MANGGARAI



TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN PARIWISATA DI DAERAH

- Pengelolaan pariwisata di daerah bervariasi
- Bali, Jogya: wisatawan dan nilai adat
- NTT: belum maksimal



PARIWISATA SUKSES:



- Profesionalitas pengelolaan pariwisata
- Sinergisitas dan kolaborasi pemerintah, pelaku wisata dan masyarakat

KOMITMEN PEMERINTAH

- Juridis, Politis dan finansial
- Perlindungan nilai adat:
 - Perda perlindungan budaya lokal
 - Pelestarian Lembaga adat
 - Program pemberdayaan desa adat dan sdmnya



KETERLIBATAN PELAKU WISATA: HOTEL, RESTAURANT, TAKSI, SATPAM: PROFESSIONAL DAN PAHAM BUDAYA LOKAL



PERANSERTA MASYARAKAT UMUM



KESIMPULAN

- Profesionalitas dalam pengelolaannya
- Kolaborasi dan sinergisitas pemerintah, pelaku wisata, dan Masyarakat
- Perda perlindungan budaya local
- Penguatan Lembaga adat
- Pemberdayaan desa adat dan manusianya



SARAN



- Undang-undang pariwisata yang lebih komprehensif mencantumkan pengakuan akan keberadaan budaya setempat (nilai-nilai adat local dan kearifan lokal) dan peran masyarakat adatnya, peran pemerintah dan pelaku wisata dalam melindungi nilai adat dan aspek budaya setempat.



Dr. Maksimus Regus, S.Fil., M.Si
(Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, NTT)

**“Peran Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan
Wisata Budaya serta Arah Pembangunan Pariwisata
Kabupaten Manggarai ke Depan”**



Assalamualaikum,
Shalom,
Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin semua

Lima tahun terakhir jika menyebut pariwisata, refleksi sebagai orang lokal, pariwisata merupakan sebuah *term* yang mewah, *term* yang sulit untuk dijangkau. Labuan Bajo yang dilabeli sebagai pariwisata super prioritas, mengakibatkan munculnya sebuah narasi dominan, dengan kebijakan, investasi, dan kucuran dana yang besar. Namun, terdapat *gap* yang sangat signifikan antara narasi pariwisata ini dengan posisi kelokalan. Perspektif lokal ini bagus apabila diberi ruang di RUU tentang Kepariwisataan. Khususnya kelokalan yang dimaksud adalah jika bicara mengenai kebudayaan yang merupakan hal penting dan fundamental. Menyusun RUU tentang Kepariwisataan ini menjadi usaha untuk menyusun Indonesia lebih baik.

Pariwisata tidak boleh lebih besar dari Indonesia itu sendiri. Melalui undang-undang ini diharapkan dapat memberi perlindungan bagi kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan sebagai narasi dominan pariwisata berdampingan dengan multi narasi lainnya. Pariwisata itu sendiri sebagai akulturasi ekonomi dan profit, maka narasi-narasi itu dalam studi kolonial akan menjadi *sub counter* narasi. Baik narasi yang terjajah maupun dominan naratif yang mengarah dengan kelokalan.

Undang-undang ini harus dapat melindungi suatu kawasan pariwisata dari adanya investasi luar biasa yang menjadi dominan, namun menyebabkan kawasan penyangga lainnya tidak tersentuh, seperti hal nya Labuan Bajo dan Ruteng. Undang-undang ini harus memberi afirmasi bagi daerah kawasan penyangga sehingga tidak ada *gap*.

Bapak, Ibu dan hadirin sekalian,

Perspektif budaya di suatu kawasan pariwisata tidak muncul karena sudah terintimidasi dengan narasi dominan. Saya pikir kelokalan merupakan kewajiban kultural. Saat ini kewajiban kultural tersebut terkikis dan terjembatani antar dimensi antara kultural dengan kepariwisataan sendiri. Pariwisata menjadi lawan dalam konstruksi sosial. Secara kultural kita memiliki rintangan-rintangan tertentu, bahwa terdapat adat kebiasaan yang belum dapat berdialog dengan kepariwisataan itu sendiri.

Dalam penyusunan RUU tentang Kepariwisataan ini perlu melihat aspek pendekatan yang secara dominan akan dimunculkan dalam undang-undang ini, apakah dengan undang-undang ini akan dimunculkan karakteristik lokal dan kekayaan lokal yang sangat unik atau tidak. Jika hal tersebut dimunculkan maka harus dibarengi dengan kebijakan. Sebagai contoh, daerah Manggarai dan Manggarai Timur jika tidak difasilitasi oleh Pemerintah Pusat maka tidak akan bisa seperti daerah Manggarai Barat yang didalamnya ada Labuan Bajo. Promosi suatu kawasan dengan kelokalan yang dimilikinya memang diperlukan, namun selain itu paling penting adanya investasi pendanaan. Karena jika tidak ada pembiayaan dari Pemerintah Pusat situasi akan tetap seperti ini yaitu tertimpa.

Undang-undang ini dengan perhatian pada dimensi kultural dan aspek lokal harus menjadi sebuah jembatan kucuran bagi dialog kebudayaan yang harus terjadi. RUU tentang Kepariwisataan ini diharapkan dapat lebih dari sekedar regulasi, namun merupakan

jembatan dialog kebudayaan yang bukan hanya promosi kebudayaan. Titik kritis dan krusial dari undang-undang ini adalah jika ingin membawa dalam sebuah wacana lebih besar Indonesia, maka harus menarasikan budaya melalui investasi. Multi narasi yang ada diberi investasi yang luas, selanjutnya terdapat pemberian sanksi, karena sejauh ini yang dilakukan saat ini hanya sebatas kehendak Riparnas.

Demikian paparan dari saya, sekian dan terima kasih.

Shalom

MATERI

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WISATA BUDAYA SERTA ARAH PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN MANGGARAI KE DEPAN¹

Dr. Maksimus Regus, S.Fil., M.Si²
Universitas Katolik Indonesia Santa Paulus Ruteng, NTT

PENGANTAR

Pariwisata memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara, sekaligus menjadi jendela bagi dunia untuk memahami keberagaman budaya yang dimiliki. Dalam konteks Indonesia, sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menggali kekayaan budaya yang begitu beragam. Dalam rangka mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah Indonesia merespon dengan merumuskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terhadap pengembangan pariwisata berperspektif kebudayaan. Pemberian undang-undang ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pariwisata dengan dinamika budaya masyarakat Indonesia yang kaya. Pergeseran paradigma dari pandangan pariwisata hanya sebagai industri menuju pendekatan yang lebih holistik dan berkesinambungan menjadi fokus utama yang perlu dianalisis dalam kaitannya dengan keberlanjutan budaya.

Pentingnya melestarikan kebudayaan lokal dan mengintegrasikannya dalam pengembangan pariwisata adalah dasar utama pembahasan dalam paper ini. Pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian warisan budaya, dan pengembangan produk pariwisata berbasis budaya akan diulas secara mendalam. Selain itu, analisis dampak sosial dan ekonomi dari implementasi perubahan undang-undang terhadap pelaku pariwisata dan masyarakat lokal akan menjadi bagian integral dari penelitian ini.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap perubahan regulasi dan perspektif kebudayaan, diharapkan paper ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan pelaku industri pariwisata. Paper ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang dalam pembangunan pariwisata yang berlandaskan kearifan lokal dan berkesinambungan.

Dengan memahami esensi budaya dalam pengembangan pariwisata, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai pilar ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keberagaman budaya sebagai aset tak ternilai yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata Indonesia. Sehingga, pemberian undang-undang ini bukan hanya menjadi langkah hukum semata,

¹Paper disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Membangun Pariwisata Berperspektif Kebudayaan dalam Rangka Perbaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dalam kerja sama antara Badan Kelembaga DPR-RI dan Universitas Katolik Indonesia Santa Paulus Ruteng, Aula Gedung Utama Timur Lantai 5, UNIKSA Santa Paulus Ruteng, 12 Januari 2024

²Rector Universitas Katolik Indonesia Santa Paulus Ruteng

tetapi juga sebuah perjalanan panjang untuk membangun pariwisata yang memadukan kekayaan budaya dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WISATA BUDAYA

Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata budaya di Kabupaten Manggarai. Dengan memberikan penekanan pada peran mereka sebagai pelaku utama, dapat diciptakan dampak positif yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik unik setiap wilayah. Ini mengacu pada konsep pemberdayaan yang tidak hanya memberikan hak kepada masyarakat, tetapi juga memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata.

Penting untuk menggali kearifan lokal dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai. Melibatkan mereka dalam proses perencanaan pariwisata dapat menghasilkan solusi yang lebih autentik dan berkelanjutan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pariwisata dapat menciptakan keberlanjutan yang lebih baik dan membantu menjaga integritas budaya.

Pemberdayaan masyarakat lokal juga mencakup pengikutsertaan mereka dalam pengambilan keputusan strategis. Forum dialog inklusif harus diciptakan untuk memastikan perwakilan semua pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, tokoh adat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pariwisata. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), dialog dan partisipasi aktif masyarakat dapat menciptakan kesepahaman bersama tentang arah pembangunan pariwisata yang diinginkan.

Dalam konteks promosi destinasi wisata, keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai pemberi ide dan kreativitas. Melibatkan mereka dalam proses promosi dapat menciptakan narasi autentik yang menarik bagi wisatawan. Inisiatif ini dapat meningkatkan daya tarik destinasi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

Untuk mencapai partisipasi aktif masyarakat, diperlukan pelatihan dan workshop yang memberikan warga pemahaman mendalam mengenai potensi wisata budaya mereka. Hal ini sesuai dengan pendekatan bottom-up, di mana masyarakat lokal memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pariwisata.

Penting untuk dicatat bahwa pemberdayaan masyarakat lokal juga berarti memberikan akses pada sumber daya dan peluang ekonomi. Inisiatif ini memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang adil dari industri pariwisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menjaga Keberlanjutan dan Menciptakan Daya Tarik Wisata yang Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai

Warisan budaya lokal memiliki peran sentral dalam memperkaya pengalaman pariwisata dan menjadi aset utama untuk menarik minat wisatawan. Dalam konteks Kabupaten Manggarai,

menjaga dan melestarikan warisan budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sebuah kewajiban bersama masyarakat. Fokus pada pelestarian warisan budaya sebagai aset utama pariwisata harus diimbangi dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya konservasi dan perlindungan situs-situs bersejarah.

Penting untuk mengutamakan pelestarian warisan budaya lokal sebagai landasan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Menurut McKercher dan du Cros (2002), penekanan pada pelestarian dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan pariwisata yang tidak merusak integritas budaya dan lingkungan.

Salah satu pendekatan utama adalah melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi dan perlindungan situs-situs bersejarah. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan warisan budaya tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan, tetapi juga memastikan pengelolaan yang berkelanjutan. Program pelibatan masyarakat dapat mencakup pelatihan tentang teknik konservasi, peran warga dalam pengawasan situs-situs bersejarah, dan pengembangan kegiatan pelestarian oleh masyarakat lokal.

Edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan budaya mereka memainkan peran kunci dalam melestarikan warisan. Langkah-langkah edukasi ini dapat melibatkan kampanye penyuluhan, pelatihan, dan pembuatan materi edukatif. Menurut Timothy (2011), pemahaman masyarakat tentang nilai warisan budaya mereka adalah prasyarat penting untuk mendukung upaya pelestarian.

Penting untuk menekankan bahwa keberlanjutan bukan hanya mengenai pelestarian fisik warisan budaya, tetapi juga melibatkan praktik-praktek budaya yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pendekatan inklusif yang menghormati nilai-nilai dan tradisi masyarakat lokal perlu diadopsi. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait upaya pelestarian adalah langkah krusial menuju pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Graham & Howard, 2008).

Warisan budaya yang dipelihara dengan baik dapat menjadi daya tarik wisata yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian, destinasi pariwisata dapat menciptakan pengalaman autentik yang memikat wisatawan yang mencari keunikan dan kedalaman kultural. Hal ini sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang menempatkan pelestarian warisan sebagai salah satu pilar utamanya (UNESCO, 2019).

Dengan mengutamakan pelestarian warisan budaya sebagai aset utama, melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi, dan mengedukasi mereka mengenai keberlanjutan budaya, Kabupaten Manggarai dapat membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis Budaya di Kabupaten Manggarai

Pengembangan produk pariwisata berbasis budaya menjadi kunci dalam menarik minat wisatawan dan menciptakan destinasi yang unik. Kabupaten Manggarai, dengan kekayaan budaya lokalnya, memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk wisata yang mencerminkan keunikan dan keautentikan budayanya. Dalam upaya mencapai hal ini, merancang produk wisata yang mencakup festival, kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan kuliner khas menjadi strategi penting.

Mengutamakan Kekayaan Budaya Lokal: Penting untuk merancang produk wisata yang meresapi kekayaan budaya lokal. Festival tradisional, seperti upacara adat atau perayaan lokal, dapat menjadi daya tarik utama. Menurut Jamal dan Robinson (2009), festival budaya memiliki potensi besar untuk menciptakan pengalaman wisata yang mendalam dan memberikan wawasan tentang budaya setempat.

Selain itu, kerajinan tangan lokal juga dapat diintegrasikan ke dalam produk pariwisata. Dengan mendukung pengembangan dan penasaran kerajinan tangan lokal, wisatawan dapat membeli dan membawa pulang bagian dari kekayaan budaya Manggarai. Hal ini menciptakan peluang ekonomi yang langsung menguntungkan masyarakat lokal (Richards, 2018).

Seni Pertunjukan sebagai Daya Tarik: Seni pertunjukan tradisional, seperti tarian atau pertunjukan musik lokal, dapat menjadi bagian integral dari pengalaman wisata. Mengadakan pertunjukan di lokasi wisata atau dalam festival budaya dapat menambahkan dimensi budaya yang mendalam ke destinasi wisata. Studi oleh Pearce (2005) menyoroti peran seni pertunjukan dalam menciptakan pengalaman wisata yang unik dan tak terlupakan.

Kuliner Khas sebagai Magnet Wisata: Mengenalkan kuliner khas daerah menjadi aspek penting dalam pengembangan produk pariwisata. Restoran atau warung yang menyajikan hidangan lokal dapat menjadi daya tarik tersendiri. Menyelenggarakan acara kuliner, seperti festival makanan atau tur kuliner, juga dapat meningkatkan daya tarik wisata kuliner. Studi oleh Karim dan Chi (2010) menekankan pentingnya kuliner lokal dalam menciptakan pengalaman wisata autentik.

Inovasi dalam Pengalaman Wisata: Untuk menarik minat wisatawan, penting untuk mendorong inovasi dalam menciptakan pengalaman wisata yang unik. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi pemandu wisata digital atau augmented reality, dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan memberikan informasi lebih mendalam tentang sejarah dan budaya setempat (Neuhofe, Buhalis, & Ladkin, 2015).

Keberlanjutan dalam Pengembangan Produk Pariwisata: Dalam merancang produk pariwisata berbasis budaya, penting untuk memperhatikan keberlanjutan. Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam kerajinan tangan atau mempromosikan pertanian lokal yang berkelanjutan dapat mendukung prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (Swarbrooke, 2018).

Pelatihan dan Pendidikan Pariwisata

Pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat lokal dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Kabupaten Manggarai, dengan potensi wisata dan kekayaan budayanya, dapat meraih manfaat besar dari investasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat lokal di sektor pariwisata.

Pelatihan dalam Pelayanan Pelanggan: Penting untuk memberikan pelatihan dalam pelayanan pelanggan kepada masyarakat lokal, terutama bagi mereka yang langsung berinteraksi dengan wisatawan. Pelayanan pelanggan yang baik dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan membangun citra positif destinasi. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan komunikasi, keramahan, dan penanganan situasi yang mungkin terjadi selama interaksi dengan wisatawan.

Manajemen Destinasi untuk Pengembangan yang Berkelanjutan: Mengembangkan keterampilan manajemen destinasi di kalangan masyarakat lokal adalah langkah penting untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan. Melibatkan mereka dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan destinasi akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan (Page, Yeoman, Munro, & Connell, 2010). Pelatihan dapat mencakup pemahaman tentang kebijakan pariwisata, pemantauan dampak lingkungan, dan strategi pengelolaan destinasi yang berkelanjutan.

Pendidikan Formal dan Informal: Pendidikan formal dan informal menjadi instrumen utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi dan manfaat pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Program pendidikan formal di sekolah-sekolah setempat dapat memasukkan kurikulum pariwisata yang mencakup aspek-aspek keberlanjutan. Menurut Gursoy, Lu, & Lu (2018), pendidikan formal dapat membentuk dasar pemahaman dan minat masyarakat terhadap sektor pariwisata. Sementara itu, pendidikan informal dapat mencakup workshop, seminar, atau pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi non-pemerintah. Pendidikan informal dapat lebih terfokus pada kebutuhan praktis dan perkembangan keterampilan langsung yang relevan dengan sektor pariwisata (Richards & Palmer, 2010).

Pendidikan tentang Potensi dan Manfaat Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan: Penting untuk memberikan edukasi yang menyeluruh tentang potensi dan manfaat pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Ini melibatkan pemahaman tentang dampak positif pariwisata terhadap ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan. Menurut Weaver dan Lawton (2014), pemahaman yang kuat tentang manfaat pariwisata berkelanjutan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap perkembangan sektor ini.

Pendidikan tentang keberlanjutan juga harus menyoroti tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan dan budaya setempat. Dengan membentuk pemahaman ini, masyarakat lokal dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan formal dan informal yang berkelanjutan, Kabupaten Manggarai dapat membangun sumber daya manusia yang siap untuk menghadapi tantangan dan peluang di sektor pariwisata yang semakin dinamis.

Partnership antara Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Manggarai memerlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Melalui kerjasama yang berkesinambungan, dapat diciptakan lingkungan di mana pertumbuhan ekonomi pariwisata sejalan dengan pelestarian budaya dan lingkungan.

Membangun Kemitraan yang Kuat: Pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal harus berkolaborasi dalam membangun kemitraan yang kuat. Inisiatif bersama ini dapat melibatkan penyelenggaraan forum dialog, pertemuan rutin antara pemangku kepentingan, dan pembentukan badan koordinasi pariwisata. Menurut Bramwell dan Lane (2011), kolaborasi

semacam ini dapat menciptakan platform di mana semua pihak dapat berkontribusi dan membagi tanggung jawab.

Mengembangkan Mekanisme Manfaat Ekonomi yang Adil: Penting untuk menciptakan mekanisme yang memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari industri pariwisata. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melibatkan masyarakat dalam pemilihan dan pengelolaan proyek-proyek pariwisata. Menurut Jamal dan Stronza (2009), partisipasi langsung masyarakat dapat meningkatkan distribusi manfaat ekonomi secara lebih merata.

Pemerintah daerah dapat memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi penyedia layanan, seperti penginapan, restoran, atau penyedia pengalaman lokal. Program pelatihan dan dukungan teknis dapat diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai sektor pariwisata.

Selain itu, perlu diterapkan kebijakan pembagian keuntungan yang adil, termasuk kerjasama dengan usaha mikro dan kecil lokal serta integrasi produk-produk lokal ke dalam rantai nilai pariwisata. Ini akan memberikan insentif bagi masyarakat lokal untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

Pengelolaan yang Bertanggung Jawab terhadap Lingkungan dan Budaya: Partnership antara pemerintah dan sektor swasta harus diarahkan untuk memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan budaya. Perlu adanya regulasi yang jelas dan insentif bagi pelaku usaha pariwisata untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. Kebijakan dan insentif ini dapat mencakup penghargaan bagi usaha-usaha pariwisata yang berkomitmen pada keberlanjutan.

Pemerintah dapat memastikan bahwa regulasi dan standar keberlanjutan diimplementasikan dan ditegakkan secara efektif. Ini termasuk kontrol terhadap kapasitas wisata, perlindungan terhadap area alam dan budaya yang sensitif, serta pengelolaan limbah dan konsumsi sumber daya yang berkelanjutan.

Sementara itu, sektor swasta dapat berperan aktif dalam membangun model bisnis yang memprioritaskan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Masyarakat lokal juga harus terlibat dalam pengawasan dan pemantauan untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang berkelanjutan diterapkan.

Promosi Berbasis Komunitas

Penggunaan pendekatan promosi berbasis komunitas adalah langkah strategis dalam memasarkan destinasi wisata Kabupaten Manggarai. Dalam konteks ini, melibatkan komunitas lokal tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai mitra aktif dalam menggambarkan keindahan dan keunikannya. Pemanfaatan media sosial dan konten digital menjadi kunci dalam menyebarkan pesan positif dan menciptakan pengalaman wisatawan yang tak terlupakan.

Mengintegrasikan Komunitas dalam Pemasaran Wisata: Pendekatan promosi berbasis komunitas mengakui peran sentral masyarakat lokal dalam membentuk citra destinasi. Melibatkan komunitas dalam proses perencanaan dan eksekusi kampanye promosi akan menciptakan

keterlibatan yang lebih dalam dan citra yang lebih otentik (Govers, Go, & Kumar, 2007). Ini dapat mencakup kolaborasi dengan pelaku lokal, pengusaha, dan tokoh masyarakat untuk menyusun narasi wisata yang merefleksikan keunikan dan kekayaan budaya setempat.

Pemanfaatan Media Sosial dan Konten Digital: Media sosial dan konten digital memainkan peran vital dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Melibatkan komunitas dalam penggunaan media sosial dapat menciptakan efek domino di mana warga lokal ikut membagikan dan mempromosikan destinasi mereka sendiri. Menurut Xiang, Du, Ma, & Fan (2017), pemanfaatan media sosial dapat meningkatkan interaksi dan partisipasi masyarakat dalam mempromosikan destinasi pariwisata.

Membangun kampanye konten digital yang menarik dan berfokus pada cerita lokal dapat menciptakan daya tarik yang lebih besar. Memanfaatkan foto, video, dan ulasan dari masyarakat lokal dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam dan mendekatkan wisatawan kepada budaya lokal. Keaslian yang terpancar melalui konten digital dapat menjadi daya tarik utama bagi mereka yang mencari pengalaman wisata yang otentik (Giaoutzi & Nijkamp, 2006).

Membangun Kesadaran tentang Kebersihan dan Keramahan: Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keramahan menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan. Kampanye promosi dapat mencakup pesan-pesan mengenai kebersihan lingkungan, pelestarian alam, dan tata tertib wisatawan. Mendorong kesadaran ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye daring dan kegiatan sosialisasi di masyarakat.

Selain itu, membangun budaya keramahan di kalangan masyarakat lokal akan membantu menciptakan atmosfer yang menyenangkan bagi wisatawan. Pelatihan tentang pelayanan pelanggan yang ramah dan kerjasama dengan pelaku industri pariwisata lokal dapat menjadi langkah penting (Chien & Law, 2003). Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menerapkan norma-norma keramahan dan kebersihan dapat meningkatkan kepuasan dan kesan positif wisatawan.

Mengukuhkan Identitas Komunitas dalam Pariwisata: Promosi berbasis komunitas bukan hanya tentang menarik perhatian, tetapi juga mengukuhkan identitas komunitas dalam sektor pariwisata. Melalui kampanye-kampanye ini, masyarakat lokal dapat merasa bangga dengan warisan budaya dan keindahan alam yang mereka miliki. Ini juga dapat merangsang minat wisatawan untuk berinteraksi lebih dekat dengan komunitas lokal, menciptakan hubungan yang berkelanjutan.

Dengan melibatkan komunitas dalam pemasaran destinasi wisata, Kabupaten Manggarai dapat membentuk citra positif yang mempromosikan keberagaman budaya, keindahan alam, dan keramahan lokal. Pada akhirnya, ini akan menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat setempat.

Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan juga akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap destinasi mereka.

Diversifikasi pariwisata di Kabupaten Manggarai melalui pengembangan pariwisata berbasis petualangan, ekowisata, dan agrowisata adalah langkah yang cerdas untuk menciptakan daya tarik wisata yang beragam. Dengan memperluas pengalaman yang ditawarkan, membagi manfaat pariwisata secara lebih merata, dan menunjukkan tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan, Kabupaten Manggarai dapat membentuk citra sebagai destinasi wisata yang komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam konteks perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Indonesia, upaya untuk membangun pariwisata berperspektif kebudayaan telah menunjukkan relevansi dan urgensi yang tak terbantahkan. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan regulasi tersebut bukan hanya merupakan langkah hukum formal semata, melainkan sebuah tonggak penting dalam mengarahkan perkembangan pariwisata Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan memperhitungkan keberagaman budaya yang luar biasa.

Pentingnya mengintegrasikan kebudayaan dalam strategi pembangunan pariwisata menjadi sorotan utama, seiring dengan pergeseran paradigma dari pendekatan industri semata menjadi pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Penekanan pada pelestarian warisan budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengembangan produk pariwisata yang berbasis budaya menjadi landasan yang memandu perubahan kebijakan ini.

Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai elemen utama dalam pengembangan pariwisata memainkan peran kunci dalam menjaga keberlanjutan budaya. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi, tidak hanya memberikan dampak positif secara ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kearifan lokal dan tradisi tetap terjaga. Dengan cara ini, pariwisata bukan hanya menjadi penyumbang pendapatan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat identitas budaya.

Selain itu, pentingnya pengembangan produk pariwisata berbasis budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang semakin menghargai pengalaman autentik dan mendalam. Dengan memanfaatkan kekayaan budaya sebagai bahan baku utama, destinasi pariwisata dapat membangun daya saing yang berkelanjutan dan membedakan diri mereka di pasar global.

Dalam penutup, perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjadi momentum untuk mendorong transformasi positif dalam pengelolaan pariwisata Indonesia. Dengan membangun pariwisata berperspektif kebudayaan, Indonesia dapat meraih manfaat ekonomi yang signifikan sambil menjaga kelestarian budaya sebagai warisan yang tak ternilai. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pariwisata Indonesia tidak hanya tumbuh dalam angka, tetapi juga dalam nilai-nilai keberlanjutan dan kearifan lokal yang melekat.

REFERENSI

- Ab Karim, S., & Chi, C. G. Q. (2010). Culinary tourism as a destination attraction: An empirical examination of destinations' food image. *Journal of hospitality marketing & management*, 19(6), 531-555.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 411–421. DOI: 10.1080/09669582.2011.570729
- Chien, G. C., & Law, R. (2003). The Impact of the Severe Acute Respiratory Syndrome on Hotels: A Case Study of Hong Kong. *International Journal of Hospitality Management*, 22(3), 327–332.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- DOI: 10.1016/s0278-4319(03)00050-6
- Giaoutzi, M., & Nijkamp, P. (Eds.). (2006). *Tourism and regional development: New pathways*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Govers, R., Go, F. M., & Kumar, K. (2007). Promoting Tourism Destination Image. *Journal of Travel Research*, 46(1), 15–23. DOI: 10.1177/0047287507302377
- Graham, B., & Howard, P. (2008). *The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Jamal, T., & Robinson, M. (2009). *The SAGE Handbook of Tourism Studies*. SAGE Publications.
- Jamal, T. B., & Stronza, A. L. (2009). Collaboration theory and tourism practice in protected areas: Stakeholders, structuring, and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(2), 169–189. DOI: 10.1080/09669580802359289
- McKercher, B., & du Cros, H. (2002). *Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management*. Haworth Hospitality Press.
- Neuhofen, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2015). Technology as a Catalyst of Change: Enablers and Barriers of Tourist Experiences and Co-Creation. *The Routledge Handbook of Transport Economics*, 272–287. DOI: 10.4324/9781315777771.ch19
- Page, S. J., Yeoman, I., Munro, C., & Connell, J. (2010). *Tourism: A Modern Synthesis*. Cengage Learning EMEA.
- Pearce, P. L. (2005). Tourist Art as Kitsch. *Annals of Tourism Research*, 32(3), 667–684. DOI: 10.1016/j.annals.2004.10.006
- Richards, G. (2018). *Tourism and Gastronomy*. Routledge (Hjalager, A. M., & Richards, G. (Eds.). (2003). *Tourism and gastronomy*. Routledge).
- Richards, G., & Palmer, R. (2010). *Eventful Cities: Cultural management and urban revitalization*. Elsevier.

Dr. Frans Teguh MA., CHE
(Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan
Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

**“Perspektif Kebudayaan dalam Pembangunan
Kepariwisataan”**



PAPARAN

***Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.***

Pembangunan pariwisata di Labuan Bajo berjalan sangat pesat. Banyak catatan kritis terhadap Labuan Bajo. Pembangunan pariwisata bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi merupakan momentum/peluang yang dapat menjadi berkah (*tonic*) sedangkan di sisi lain dapat menjadi bencana (*toxic*).

Berdasarkan data dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, sampai dengan tahun 2022, jumlah warisan budaya tak benda di Indonesia yang sudah ditetapkan sebanyak 1728. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya menjadikan budaya sebagai basis nilai dan tonggak pengembangan pariwisata di berbagai destinasi, salah satunya Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

Paradigma pembangunan kepariwisataan dalam perspektif kebudayaan menekankan pada beberapa poin. *Pertama*, pembangunan kepariwisataan berbasis nilai dan sains/ilmu pengetahuan. *Kedua*, kebudayaan merupakan roh dan spirit kepariwisataan. *Ketiga*, perlu disadari bahwa kebudayaan adalah modalitas pembangunan kepariwisataan. *Keempat*, kepariwisataan berperan dalam upaya pemajuan kebudayaan. *Kelima*, pembangunan kepariwisataan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Pembangunan kepariwisataan tidak terlepas dari upaya pelindungan terhadap nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Selain itu

pembangunan kepariwisataan juga harus mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati,

Perspektif pemajuan kebudayaan dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pada tiga aspek yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan juga selaras dengan pengembangan ekosistem kepariwisataan. Kesinambungan dan keselarasan antara pariwisata dan budaya merupakan kata kunci. Dalam pariwisata, persoalan narasi merupakan hal yang penting, bagaimana menarasikan/mempromosikan budaya. Adapun produk akan terkait dengan pengalaman (*experience*). Berbagai pemangku terkait harus mampu merancang produk wisata serta memproyeksikan pengalaman apa yang akan diperoleh wisatawan.

Unsur kebudayaan dalam pariwisata antara lain bahasa, masyarakat atau tradisi, kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan makan, musik dan kesenian, sejarah suatu tempat atau *history of the region*, cara kerja dan teknologi, bentuk dan karakteristik arsitektur di daerah, serta tata cara berpakaian penduduk setempat. Dari unsur tersebut, dapat dirancang pengembangan pariwisata budaya dengan kegiatan menjelajah untuk melihat, meneliti, mengetahui, dan memahami warisan budaya yang masih berlangsung hingga sekarang serta warisan masa lalu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa warisan budaya masa lalu merupakan modal untuk pembangunan pariwisata budaya.

Kesadaran wisatawan untuk memahami warisan budaya masa lalu dalam mencari autentisitas dan identitas budaya harus disambut dengan desain pengembangan pariwisata budaya di mana wisatawan dapat mempelajari kekayaan masyarakat masa lalu melalui monumen, situs arkeologi, bangunan bersejarah, arsitektur, atau artefak. Selain itu, wisatawan diharapkan akan memperoleh pengetahuan tentang warisan budaya yang berhubungan dengan aspek kehidupan sosial budaya seperti sejarah, tradisi, adat istiadat, dan bahasa. Wisatawan juga diharapkan akan merasakan langsung pengalaman yang tidak terbatas pada membuat hasil karya tetapi juga memiliki pengalaman merasakan langsung pola hidup serta tradisi di masa lalu yang masih hidup hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, dapat diusung desain pengembangan pariwisata dengan pendekatan tata ruang budaya filosofi dan nilai kearifan lokal masyarakat. Baik dari segi penataan lanskap, bangunan, simbol, narasi, interpretasi, wisata edukasi, maupun konsep yang ditawarkan merupakan manifestasi dari filosofi serta nilai kearifan lokal masyarakat tersebut.

Dalam kepariwisataan harus diperhatikan agar destinasi, produk, atau jasa pariwisata memiliki nilai keunggulan, manfaat, nilai perbedaan, dan daya saing dengan mengutamakan lokalitas, *hospitality management*, *unique ambiance*, serta *look and feel* yang akan menjadi pilihan utama pengunjung atau wisatawan. Ke depan, pilihan pengembangan ekosistem kepariwisataan harus tetap merawat dan memuliakan sumber daya alam, meningkatkan nilai ekonomi, sosial budaya, bisnis yang berkelanjutan dengan

dukungan inovasi teknologi informasi dan digitalisasi, dan secara konsisten menerapkan model pelayanan publik dan tata kelola kolaboratif dengan partisipasi publik yang inklusif. Dengan demikian, etalase lanskap kepariwisataan dapat menjadi model pengembangan yang mengutamakan nilai *attractiveness*, *localness*, *competitiveness*, *inclusiveness*, and *sustainability* (ALCIS).

Pentingnya perspektif kebudayaan dalam pembangunan kepariwisataan perlu menjadi *highlight* dalam revisi UU tentang Kepariwisataan yang meliputi *pertama*, kepariwisataan berbasis nilai keutamaan yang terdiri atas nilai kebaikan (*bonum*), kebenaran (*verum*), keindahan (*pulchrum*), dan kesucian (*sacrum*); *kedua*, kebudayaan dan kepariwisataan sebagai proses transformasi sosial budaya, peningkatan kualitas kehidupan, area pembelajaran, *melting point* nilai lokal dan nilai terinduksi sehingga tidak sebagai tontonan melainkan menjadi tuntunan; *ketiga*, pengelolaan *backstage* dan *frontstage culture* melalui interpretasi, narasi, cerita-visitor management, business model, dan management model. *Keempat*, people centered, domestic sustainability, equilibrium; *kelima*, pendekatan ekosistem kepariwisataan yang memperhatikan aspek bumi (lingkungan hidup), biologis, sosial, budaya, ekonomi, dan digital; *keenam*, keberlanjutan budaya menuju pembangunan kepariwisataan berkualitas, berkelanjutan, dan holistik; *ketujuh*, pengalaman holistik berupa *mind body soul experience*; *kedelapan*, pengelolaan yang mencegah komersialisasi, eksplorasi, komodifikasi eksesif, dan dekulturalisasi. *Kesembilan*, perlu

pengelolaan *tonic* (potensi, sumber daya) dan *toxic* (kebencanaan) dalam kepariwisataan; *kesepuluh*, keunikan/kekhasan, otentisitas, lokalitas, *point of difference* sebagai DNA kepariwisataan; *kesebelas*, perlindungan/konsevasi dan pengembangan budaya yang dinamis melalui regulasi dan nilai kearifan lokal, kelembagaan, dan pemberdayaan; *keduabelas*, kebanggaan, karakter, dan martabat untuk menciptakan *sense of place, destination uniqueness* menuju ALCIS. Terakhir, *ketigabelas*, komitmen serta konsistensi pemerintah dan *stakeholders* termasuk masyarakat.

Demikian paparan dari saya dan terima kasih.

Wassalamualaikum,

Shalom,

Om santi santi om,

MATERI



PARADIGMA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN:

- PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BERBASIS NILAI DAN SAINS/ILMU PENGETAHUAN
- KEBUDAYAAN ADALAH ROH & SPIRIT KEPARIWISATAAN
- KEBUDAYAAN ADALAH MODALITAS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
- KEPARIWISATAAN BERPERAN DALAM UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN
- PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA, KERAGAMAN BUDAYA, DAN KEARIFAN LOKAL; PERLINDUNGAN TERHADAP NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT, KELESTARIAN DAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP, SERTA KEPENTINGAN NASIONAL; DAN MAMPU MENGHADAPI TANTANGAN PERUBAHAN KEHIDUPAN IOKAL, NASIONAL, DAN GLOBAL;

Wujud Kebudayaan

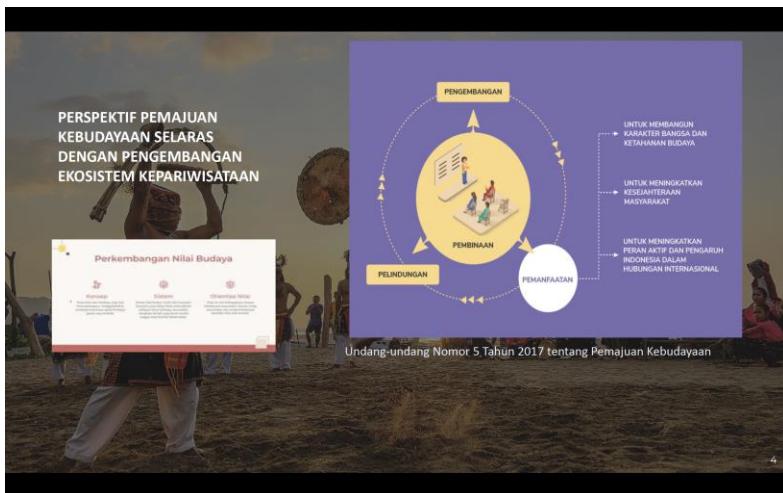
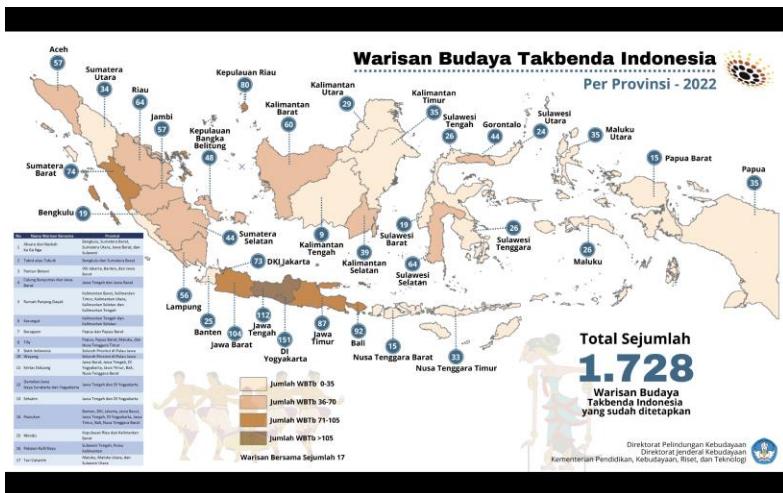
Ada tiga wujud kebudayaan. Ketiga wujud itu tidak terpisah satu dengan lain.

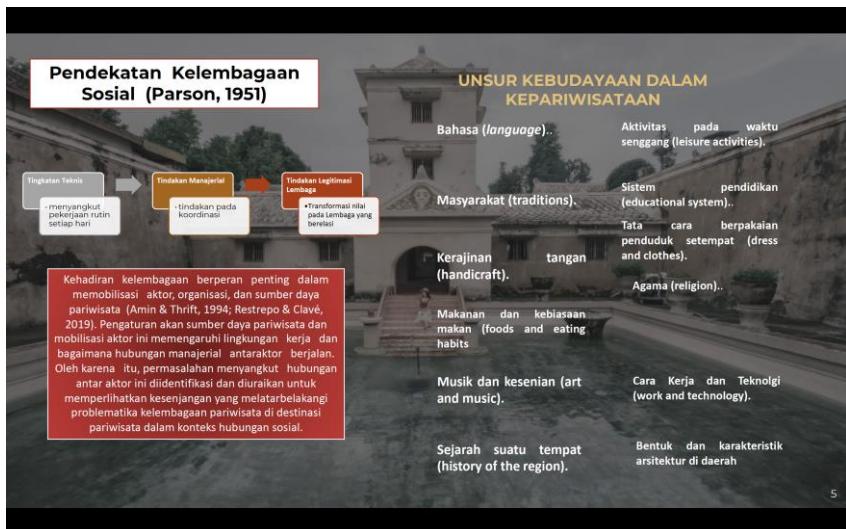
Gagasan	Tindakan	Hasil karya manusia
Bentuknya antara lain berupa kumpulan ide atau gagasan, nilai, norma, dan peraturan.	Contohnya tata upacara tradisi selamat untuk bayi yang bali lahir dan tirtharani.	berupa benda-benda budaya, seperti tugu peringatan dan candi.

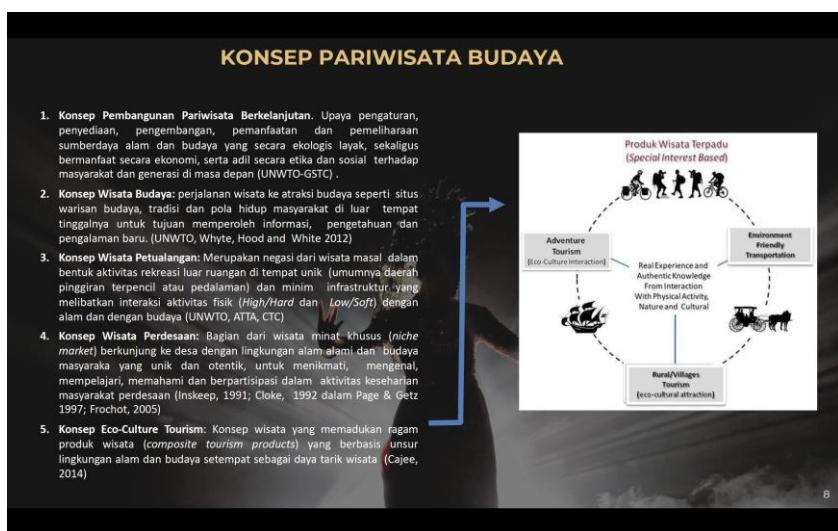
GEOGRAFI

Wujud Kebudayaan menurut JJ Homanns

- Wujud Persema (Moral)
- Kompleksitas Ide/Gagasan
- Kepercayaan/Persatuan
- Value/Nilai
- Wujud Kedua (Aesthetik)
- Aksara/Bahasa/Aliran
- Sistem/Sosial
- Wujud Ketiga (Aritstik)
- Arsitektur
- Seni
- Dongeng/Cerita Rakyat
- Tari/Tradisional







Pentingnya Konteks Kepariwisataan

- Alat/tools/instrument bukan tujuan akhir
- Perpindahan sementara orang dari suatu tempat/ temporer
- *Curiosity* nilai unik (berbeda), sumber daya budaya dan sumber daya alam yang endemik (langka).
- Konservasi dinamis, bukan eksplorasi (mencegah komersialisasi alam dan budaya);
- Pengalaman holistic dan pengetahuan , untuk meningkatkan kualitas kehidupan
- Alami, Otentik, dan Genuine, bersumber dari, untuk dan oleh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan budaya;
- Tataan Orkestrasi ekosistem para pihak secara holistic yang berkelanjutan;

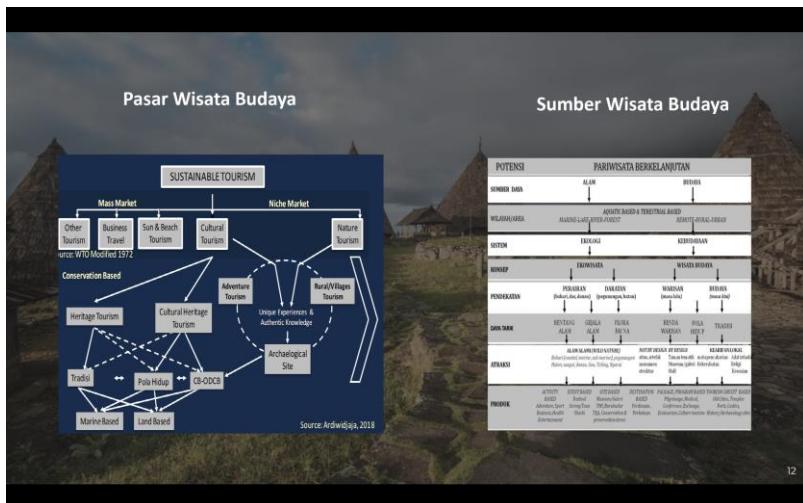
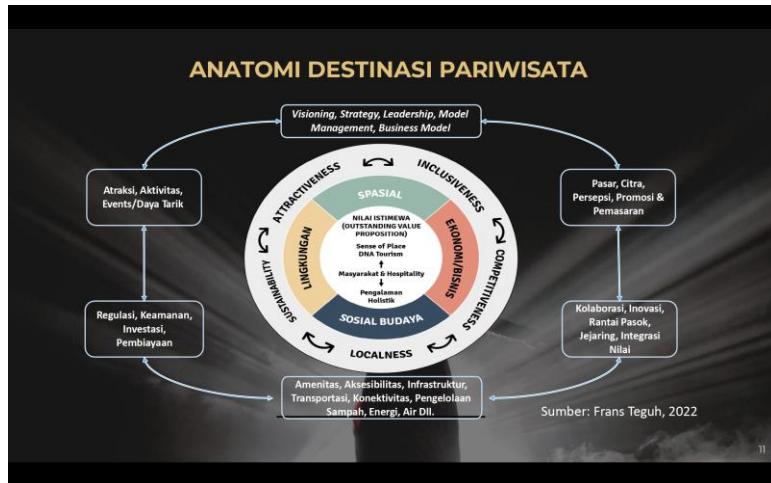
Pentingnya Pengembangan Pariwisata Budaya

- kekayaan masyarakat masa lalu yang digambarkan melalui monumen, situs arkeologi, bangunan bersejarah, arsitektur atau artefak (Shilling, 2000).
 - apresiasi dan pengetahuan tentang warisan budaya yang berhubungan dengan aspek kehidupan sosial budaya (Humanities) seperti sejarah, tradisi, adat istiadat, bahasa dan sebagainya (Fletcher, 1996).
 - hasil karya manusia yang tidak terbatas pada kesenian, tetapi juga meliputi pola hidup, tradisi hingga benda materi yang dihasilkan di masa lalu dan sekarang (Dirk, 2000).
 - perjalanan untuk melihat, meneliti, mengetahui, dan memahami warisan budaya yang masih berlangsung hingga sekarang (*cultural heritage tourism*), serta warisan masa lalu (*heritage tourism*).
 - memanfaatkan berbagai aspek kebudayaan secara massal
1. Kesadaran wisatawan untuk memahami warisan budaya masa lalu. Hal itu untuk mencari identitas dan identitas budaya
 2. Warisan budaya masa lalu dianggap sebagai modal (*cultural capital*)

DESTINASI PARIWISATA BUDAYA



10



EKOSISTEM KEPARIWISATAAN MATTERS

WHAT?

APA ITU EKOSISTEM KEPARIWISATAAN?

* KESALARASAN/SIMFONI/SINERGI KOMPONEN, ORGANISME, SUBSISTEM, SISTEM DAN EKOSISTEM YANG TERKONSEP, TERINTEGRASI, SALING BERINTERAKSI DAN MELENGKAP, DAN MENGHOLIKAN DALAM TAHANAN TOTALITAS KEPARIWISATAAN YANG HOLISTIC.

WHY?

MENGAPA EKOSISTEM KEPARIWISATAAN?

EKOSENTRIS/EGOSISTEM, BLINDSPOT, LINTAS WAKTU DAN LINTAS SKALA, MULTILEVEL/LAYER, KEMATIAN RANTAI NILAI HUHU MILIEU, KONSEP KONSEP DILAKUKAN PADA SUMBER DAN PUNCAK, LINTURNYA DNA & KARAKTER, KEHILANGAN SENSE OF PLACE, DEKADENSI NILAI, OVERCOMMODITYISATION, DENTALISASI, DEPOLITISASI, DESESUALISASI, KESSAMMANGAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, EKLOG, TEKNOLOGI, DAN SPIRITUAL, DINAMIKA VUCA, TREND DAN PERLUAKU, PERUBAHAN KLIM, DECARBONISING ECONOMIES

HOW?

BAGAIMANA EKOSISTEM KEPARIWISATAAN?

ORKESTRASI, ANSAMBLE, KOKREASI, KOLABORASI, KOMMITMENT, PREFERENCIANAN, DESAIN, PARTITUR, ESEKUSI, SYSTEM THINKING, CASUAL LOOP, DIAGRAM COHERENT RESULT BASED PENGUATAN NILAI, DNA & SENSE OF PLACE, PENGUKURAN DAN ANALISIS BUMBU MANAJEMEN BERBASIS EKOSISTEM KEPARIWISATAAN, KONVERGENSI DAN AGREGASI - BUMI, BIOLOGI, SOSIAL BUDAYA, EKONOMI/BISNIS, TEKNOLOGI/DIGITAL

RESET KUALITAS DAN NILAI KEPARIWISATAAN : ALCIS, HOLISTIC EXPERIENCE, EQUILIBRIUM, KESALARASAN, HARMONI, KEBERLANJUTAN DAN KEBAHAGIAAN (SUSTAINABILITY AND SERENITY, HAPPINESS)

PENGUATAN NILAI KEBUDAYAAN MELALUI AGREGASI EKOSISTEM KEPARIWISATAAN

- Paradigma dan literasi ekosistem kepariwisataan meneckarkan agregasi berbasis system thinking terhadap kompleksitas fenomena secara alami dan artifisial dari ekosistem bumi, biologis, sosial-budaya, ekonomi, dan digital.
- Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan konteks, interkoneksi komponen, subsistem, dan sistem yang terintegrasi dalam makrokosmos dan mikrokosmos kepariwisataan.
- Berbagai dukungan pengukuran sistem, regulasi, dan tata kelola diperlukan melalui optimasi peran para pihak (business, government, community, academic, and media).
- Pada gilirannya, ekosistem ini hendaknya mampu mendorong upaya orkestrasi untuk mewujudkan simfonis penyelenggaraan kepariwisataan yang bernilai

```

graph TD
    EB((EKOSISTEM BUMI)) --- EK((EKOSISTEM KEPARIWISATAAN))
    ED((EKOSISTEM DIGITAL)) --- EK
    EB --- ES((EKOSISTEM SOSIAL BUDAYA))
    EB --- EBIS((EKOSISTEM BISNIS))
    EK --- EBIS
    
```



15



16

KUALITAS KAWASAN DAN MANAJEMEN BERBASIS EKOSISTEM KEPARIWISATAAN



Kualitas tatanan ekosistem niscaya menghindari bencana ekologis, denaturalisasi, dekadesi nilai/martabat, social distrust, dehumanisasi, komersialisasi, dan hegemoni yang masif seperti perubahan iklim yang ekstrem, kematian rantai nilai ekosistem dan disequilibrium.

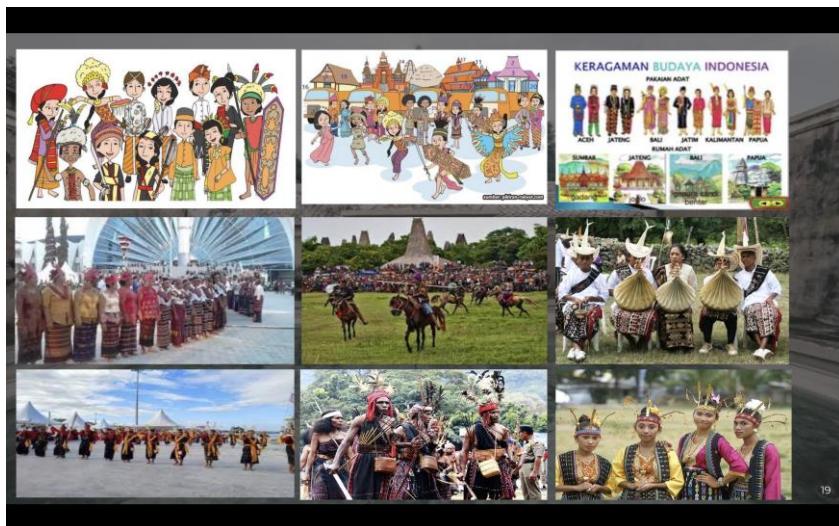
Manajemen berbasis ekosistem kepariwisataan mengutamakan penguatan outstanding values proposition dalam mengelola berbagai kesenjangan ekologis, sosial, teknologi, dan spiritual di tengah pusaran VUCA. Fakta empiris menunjukkan terjadi disrupti, perubahan tren, perilaku, dan gaya hidup manusia pascapandemi, bahkan maraknya media sosial di era post-truth. Hal ini lalu menjadi lanskap pemikiran ekosistem kepariwisataan menuju kualitas pengalaman holistik, reputasi, dan pilihan destinasi futuristik yang berkarakter dan bertanggung jawab. (Frans Teguh, 2022)

17

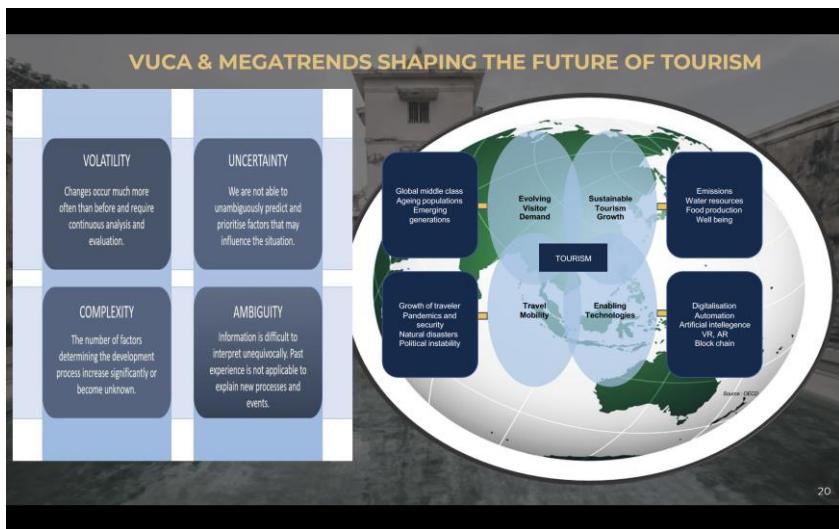
QUALITY AND SUSTAINABLE TOURISM DALAM TRANSFORMASI EKOSISTEM KEPARIWISATAAN

Sistem, Standar, Sinergi, Skala Kapasitas
(Spasial, Sosial, Ekonomi, Lingkungan,
Budaya)





19



20

HIGHLIGHT PENTINGNYA PERSPEKTIF KEBUDAYAAN DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DALAM REVISI UU KEPARIWISATAAN

- KEPARIWISATAAN BERBASIS NILAI KEUTAMAAN : KEBAIKAN (*BONUM*), KEBENARAN (*VERUM*) KEINDAHAN (*PULCHRUM*) DAN KESUCIAN (*SACRUM*)
- KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN SEBAGAI PROSES TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA, PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN, AREA PEMBELAJARAN, *MELTING POINT* NILAI LOKAL DAN NILAI TERINDUKSI - TIDAK SEBAGAI TONTONAN TAPI TUNTUNAN
- PENGELOLAAN *BACKSTAGE & FRONTSTAGE CULTURE* MELALUI INTERPRETASI, NARASI, CERITA- VISITOR MANAGEMENT, BUSINESS MODEL & MANAGEMENT MODEL
- *PEOPLE CENTERED, DOMESTIC SUSTAINABILITY, EQUILIBRIUM*
- PENDEKATAN EKOSISTEM KEPARIWISATAAN : BUMI, BIOLOGIS, SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, DIGITAL
- KEBERLANJUTAN BUDAYA MENUJU PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BERKUALITAS, BERKELANJUTAN & HOLISTIK
- PENGALAMAN HOLISTIK : *MIND BODY SOUL EXPERIENCE*
- PENGELOLAAN DIPERLUKAN UNTUK MENCEGAH KOMERSIALISASI, EKSPLORASI & KOMODIFIKASI EKSESIF, DEKULTURALISASI. PERLU PENGELOLAAN TONIC & TOXIC DALAM KEPARIWISATAAN.
- KEUNIKAN/KEKHASIAN, OTENTISITAS, LOKALITAS, *POINT OF DIFFERENCE* SEBAGAI DNA KEPARIWISATAAN
- PERLINDUNGAN/KONSEVASI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA YANG DINAMIS MELALUI REGULASI DAN NILAI KEARIFAN LOKAL, KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN.
- KEBANGGAAN, KARAKTER DAN MARTABAT UNTUK MENCiptakan *SENSE OF PLACE, DESTINATION UNIQUENESS MENUJU ALCIS* (*ATTRACTIVENESS, LOCALNESS, COMPETITIVENESS, INCLUSIVENESS, SUSTAINABILITY*)
- KOMITMEN DAN KONSISTENSI PEMERINTAH DAN STAKEHOLDERS TERMASUK MASYARAKAT. *Tourism is everybody's business.*

21



Doc Foto: Ten Media Komparatif

Dr. Inosensius Sutam
(Akademisi UNIKA Santu Paulus Ruteng)

**“Membangun Pariwisata dengan Perspektif Kebudayaan:
Manajemen Pembangunan dan Pengembangan Wisata
Budaya di Daerah Penyangga Destinasi Pariwisata Prioritas”**



PAPARAN

*Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat,
Shalom,*

Salam sehat dan sejahtera,

Labuan Bajo saat ini ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata super premium berkelas dunia. Labuan Bajo dikenal sebagai *brand* pariwisata nasional dan dunia. Banyak wisatawan yang datang sehingga menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah. Untuk itu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur, harus menjadikan pariwisata sebagai *primeover/lokomotif* penggerak untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan upaya agar wisatawan dan keuntungan ekonomis yang diperoleh tidak hanya terdapat di Labuan Bajo, namun juga membawa keuntungan untuk Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Meskipun Labuan Bajo mendapatkan keuntungan tinggi dari sektor pariwisata, namun PAD tetap kecil, kemiskinan tinggi, dan terjadi kerusakan lingkungan.

Terdapat beberapa media atau instrumen yang menjadi jalan yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat secara masif dalam industri pariwisata, sehingga sebagai daerah penyangga Labuan Bajo masyarakat yang berada di sekitarnya telah merasakan dan mendapat imbas penetapan Labuan Bajo sebagai pariwisata premium. Salah satu yang penting adalah terjadinya transformasi fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan tradisional yang sebelumnya hanya bersifat ritual, seremonial sosial, dan politis, yang menghabiskan dana, tenaga, dan waktu, saat ini diarahkan

dan dikelola sehingga berdampak juga secara ekonomis, tanpa menghapus fungsi tradisionalnya. Tentunya hal ini harus diwaspadai agar tidak terjadi bahaya komersialisasi budaya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan), kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Faktanya terkait dengan pendapatan daerah dari bidang pariwisata masih tergolong kecil hanya mencapai 40 miliar. Sedangkan kepariwisataan bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan ekonomi rendah, begitu juga pendapatan per kapita;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dibuktikan dari IPM Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 65,90;
3. menghapus kemiskinan; saat ini angka kemiskinan di Provinsi NTT masih tinggi;
4. mengatasi pengangguran; saat ini angka pengangguran juga tinggi sehingga banyak yang menggunakan tenaga kerja wanita;
5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; hal ini disebabkan karena banyak terjadi kerusakan alam;
6. memajukan kebudayaan: sudah mulai nampak adanya pemajuan kebudayaan,

7. mengangkat citra bangsa; semakin memperkenalkan Indonesia yang dikenal dengan budaya unik, kaya akan keindahan alam, dan keramahan penduduknya
8. memupuk rasa cinta tanah air;
9. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. mempererat persahabatan antarbangsa.

Bapak, Ibu, dan para hadirin yang terhormat,

Dalam kurun waktu 13 tahun berlakunya UU tentang Kepariwisataan, ternyata masih kurang optimal dalam mencapai tujuannya, begitupun dengan implementasinya belum berjalan efektif, serta belum mengakomodasi perkembangan kepariwisataan. Sejumlah permasalahan dalam substansi dan kelembagaan di dalam UU tentang Kepariwisataan mengakibatkan belum efektif dan implementasinya UU tersebut di lapangan. Berdasarkan hal tersebut maka kita ingin merevisi UU tentang Kepariwisataan Tahun 2009. Beberapa materi muatan yang perlu dirubah yaitu:

- a. terdapat ketentuan dalam UU tentang Kepariwisataan yang multi tafsir terkait definisi dalam Pasal 1 UU tentang Kepariwisataan mengenai wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan, serta masih terdapat perbedaan penafsiran Pasal 13 UU tentang Kepariwisataan mengenai kawasan strategis pariwisata dan kawasan pariwisata khusus. Dalam implementasinya terdapat perbedaan sudut pandang, para akademisi memandang sebagai substansi dan metode,

- sedangkan ideologi kepentingan partai politik dan industri yang ada di belakangnya mempunyai sudut pandang yang berbeda.
- b. kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan belum dapat dijalankan secara keseluruhan, sebagai contoh adanya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah perihal penetapan suatu daerah menjadi Daerah Pariwisata Nasional (DPN) atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), karena dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria atau batasan dalam proses penentuannya. Dalam implementasinya, Ripparnas sering dijabarkan dalam Ripparda, namun dalam konteks yang berbeda. SDM yang ada sangat kurang kompeten, sosialisasi tidak dibuat, dan penyusunannya lebih bersifat *top down* daripada *bottom-up*, serta belum optimalnya otonomi daerah dalam bidang pariwisata.
 - c. sumber daya manusia kepariwisataan yang masih kurang dikembangkan secara optimal, pelaku usaha industri pariwisata yang masih ada yang kurang menganggap penting adanya sertifikasi usaha pariwisata, dan belum adanya pengaturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam implementasinya masih sedikit pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata, terutama sertifikasi mengenai *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE).

- d. aspek regulasi dan kebijakan, yaitu komitmen dan kepemimpinan serta kemauan politik yang diwujudkan dalam RPJMD untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas relatif masih rendah, tata ruang dan penggunaan/pemanfaatan lahan yang sering menghambat investasi di sektor pariwisata dan berpotensi memunculkan konflik, usaha di sektor pariwisata yang sering menjadi keluhan pelaku usaha di sektor pariwisata karena proses yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, serta dukungan pendanaan pemerintah yang relatif masih rendah untuk program pengembangan pariwisata merupakan permasalahan lain disektor pariwisata. Di daerah sering terjadi pergantian struktur Pemda dan SDM-nya sehingga terjadi ketidakberlanjutan kebijakan. Selain itu, keberadaan pariwisata sebagai sebuah industri, yang menjadi rebutan, antara Pemda Provinsi NTT, Pemda Kabupaten Manggarai Barat, dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLF). Untuk itu dalam perubahan UU No. 10 Tahun 2009 perlu dibuat dengan jelas tupoksi dan wewenang masing-masing lembaga.
- e. dampak non ekonomis, pariwisata perlu dipandang sebagai salah satu sektor yang berpengaruh pada kondisi sosio-ekonomi dari pelaku pariwisata, sehingga dalam menghitung dampak atau *multiplier effect* pariwisata tidak lagi hanya mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga semua manfaat sosiologis dan psikologisnya terutama bagi wisatawan selaku konsumen. Adanya perkembangan pariwisata dari

- wisata massal lalu muncul wisata minat khusus menggambarkan adanya pergeseran peranan pariwisata sebagai industri berbasis pengalaman dan mengutamakan output berwisata yaitu peningkatan kualitas hidup.
- f. secara global permasalahan pembangunan kepariwisataan yang mengemuka yaitu pelaksanaan pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism*. Pariwisata berkelanjutan menurut *United Nation World environment and host communities*, (pariwisata yang sangat memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, di saat ini dan yang akan datang, dengan mengutamakan kebutuhan komunitas pengunjung, industri, lingkungan, dan tuan rumah atau masyarakat sekitar objek wisata). Lebih lanjut menurut UN-WTO, terkait dengan kebudayaan maka pariwisata berkelanjutan harus menghargai keautentikan sosial dan budaya masyarakat sekitar objek wisata, menjaga warisan budaya dan nilai tradisi yang ada, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan toleransi lintas budaya.

Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat,

Masalah pariwisata dalam perspektif budaya lokal Manggarai:

- a. *ciri meka* (menjadi tamu): *long ata lonto, lonto ata long*, Labuan Bajo adalah (alienasi masyarakat lokalnya dan budaya, nama tempat);

- b. *meka porong/meka toko*: wisatawan yang datang hanya melihat dan pulang;
- c. *ka'eng meka*: tamu yang menetap dan menguasai;
- d. *me ka'eng*: tamu yang mencari kesenangan, asal-asalan;
- e. *tiba meka*: persaudaraan hospitalitas; dan
- f. *mose meka*: dunia ini adalah tempat wisata sebelum kita memasuki.

Pariwisata ziarah mengendus jejak Allah lewat alam, budaya, dan perjumpaan dengan sesama sebagai saudara dan sahabat

Pembangunan pariwisata harus bersifat holistik dan integral mencakup segala hal dan semua orang, semua dimensi hidup, semua perspektif, semua relasi, yang menjadi suatu pentahelik. Penyelenggaraan pariwisata yang baik berdasarkan prinsip ramah (sapta ramah), yaitu:

- a. ramah martabat manusia;
- b. ramah sesama: masyarakat lokal, wisatawan;
- c. ramah budaya lokal;
- d. ramah lingkungan (ekologi);
- e. ramah nilai etis religius;
- f. ramah nilai keadilan, kerja sama, transparasi, dan kejujuran; dan
- g. ramah iptek yang manusiawi.

Dimensi operasional (*manajerial*) yang dapat dilakukan untuk membuat pariwisata (alam, budaya, dan rohani) menjadi atraksi (*attraction*):

- a. aktitivitas (*activity*): *what to see, what to buy, what to do, what kind the memory*;
- b. aksesibilitas (*accessibility*);
- c. amenitas (*amenity*);
- d. akomodasi (*accommodation*);
- e. *ansiliaritas* (*ancialirity, awareness, hospitality*): *imus caru isung, tawa caru ranga*, sikap penuh perhatian, sikap tanggap; dan
- f. akselerasi.

Hadirin yang terhormat,

Peran Unika Santu Paulus dalam bidang pariwisata yaitu:

- a. mengadakan MoU dengan Kemenparekraf pada tahun 2020;
- b. membantu dikeluarkannya SK (Perda) tentang Desa Wisata;
- c. pendampingan desa wisata, antara lain: Desa Meler dan Kelurahan Wali;
- d. FGD tentang Kebudayaan dengan pemangku adat dalam rangka pendampingan desa adat dan desa wisata;
- e. pendampingan mahasiswa untuk melek pariwisata melalui seminar, dan lokakarya;
- f. bekerja sama dengan pemerintah tiga kabupaten untuk mengembangkan pariwisata, salah satunya yang cukup berpengaruh terkait penguatan kebudayaan lokal;
- g. mengadakan penelitian dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) terkait dengan kebudayaan;

- h. mengundang pelaku pariwisata untuk mengadakan seminar dan lokakarya misalnya terkait etika pariwisata,
- i. terlibat dalam pembuatan *tagline* Kabupaten Manggarai: *Manggarai The Land of Harmony*;
- j. bekerja sama dengan pelaku pariwisata: Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI), *Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies* (ASITA) Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI), dan Asosiasi Perkapalan
- k. menyelenggarakan Festival Golo Koe, Festival Golo Curu, Perayaan Hari Pariwisata Internasional: spiritualitas, ekonomi, *social-karitatif*, ekologi,

Hadirin yang terhormat,

Materi muatan yang diusulkan untuk diamasukkan dalam RUU Kepariwisataan, antara lain:

- a. Pasal 1 dalam definisi atau batasan pengertian perlu ditambahkan definisi *online* atau wisata elektronik yang sering dilakukan pada saat pandemi Covid-19;
- b. Pasal 1 dalam definisi ditambahkan terkait dengan pentahelix pelaku pariwisata;
- c. Pasal 2 terkait dengan asas dan fungsi ditambahkan bahwa fungsi pariwisata yaitu:
 - (1) pariwisata *holistic-integral* yaitu pariwisata terbuka kepada semua hal dan semua orang, semua dimensi hidup.
 - (2) asas ekologis-berkelanjutan (*sustainable tourism, tourism and green investement*).

- d. Pasal 3 ditambahkan tujuan pariwisata yaitu untuk pelestarian alam, budaya lokal, dan budaya nasional (dikaitkan dengan Pasal 6). Perlu ada penekanan pada pelestarian lingkungan hidup dan ekologis.
- e. Pasal 4 dan Pasal 16 terkait dengan daya tarik wisata diselaraskan dan disinergikan dengan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- f. Pasal 17 perlu ditambahkan peran pemerintah dan pemerintah daerah terhadap usaha pariwisata, terutama usaha mikro kecil dan menengah. Mengingat saat ini belum berpihak pada masyarakat lokal, pemerintah atau pemerintah daerah mendampingi atau memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha-usaha pariwisata terkait dengan perlindungan budaya.
- g. Pasal 23 perlu ditambahkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan aksesibilitas pariwisata terutama untuk penyandang disabilitas.

Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Wassalamualaikum,
Shalom dan salam sejahtera.

MATERI

“Membangun pariwisata dengan perspektif kebudayaan: manajemen pembangunan dan pengembangan wisata budaya di daerah penyangga destinasi pariwisata prioritas”

Ruteng, 12 Januari 2024

Inosensius Sutam

Labuan Bajo:Pariwisata Superprioritas, Super Premium

- ▶ Labuan Bajo: brand pariwisata nasional dan dunia, wisatawan banyak datang, uang datang
- ▶ Pemda NTT, Pemda tiga Manggarai Raya: pariwsata menjadi primemover/lokomotif, apakah hal ini disertai dengan politik anggaran
- ▶ Bagaimana supaya wisatawan dan keuntungan ekonomis tidak hanya terdapat di Labuan Bajo (Manggarai Barat) tetapi juga Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur juga
- ▶ Media atau instrumen apakah yang menjadi jalan yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat secara massif dalam industri pariwsata ini, sehingga sebagai daerah penyanggah Labuan Bajo mereka merasakan dan mendapat imbas pariwsata premium?
- ▶ Jawabannya, banyak, dan salah satu yang penting adalah kebudayaan, kebudayaan tradisional. Transformasi fungsi kebudayaan: Karena itu fungsi kebudayaan tradisional yang sebelumnya hanya bersifat ritual, ceremonial social, dan politis yang menghabiskan dana, tenaga,d dan waktu, diarahkan dan dikelola untuk berdampak juga secara ekonomis, tanpa menghapus fungsi tradisionalnya. Tentu bahaya komersialisasi budaya membayang di sini.



Tujuan Pariwisata, Fakta LB SP, Fakta Manggarai Raya,

- ▶ Sejak 2014, uang yang beredar di LB dari bidang pariwisata mencapai angka triliun, 4 trilyun,
- ▶ Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Fakta: pendapatan daerah dari bidang pariwisata kecil: hanya 40 miliar, 100 miliar.
- ▶ Kepariwisataan bertujuan untuk
 1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; perumbuhan ekonomi rendah, pendapatan per kapita
 2. meningkatkan kesejahteraan rakyat; IPM NTT tahun 2022, 65,90
 3. menghapus kemiskinan; angka kemiskinan masih tinggi
 4. mengatasi pengangguran; angka pengangguran tinggi, banyak yang menjadi TKW
 5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; kerusakan alam
 6. memajukan kebudayaan: sudah mulai nampak,
 7. mengangkat citra bangsa; Indonesia dikenal dengan budaya unik, keindahan alam, keramahan
 8. memupuk rasa cinta tanah air;
 9. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 10. mempererat persahabatan antarbangsa

Interaksi antara Globalisasi dan Glokalisasi:

- ▶ Lokalitas
- ▶ Transaksional-transformasional Ekosistem
- ▶ Multiekosistem

Apa masalahnya?

- ▶ Masalah regulasi/yuridis: “Dalam kurun waktu 13 tahun berlakunya UU tentang Kepariwisataan masih kurang optimal dalam mencapai tujuannya, begitupun dengan pengimplementasianya yang belum berjalan efektif, serta belum mengakomodasi perkembangan kepariwisataan. Sejumlah permasalahan dalam substansi dan kelembagaan di dalam UU tentang Kepariwisataan”
- ▶ Karena itulah maka kita ingin merevisi UU Kepariwisataan Tahun 2009.

Malasah 1

- ▶ Pertama, terdapat ketentuan dalam UU tentang Kepariwisataan yang multitafsir terkait definisi dalam Pasal 1 UU tentang Kepariwisataan mengenai wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan, serta masih terdapat perbedaan penafsiran Pasal 13 UU tentang Kepariwisataan mengenai *kawasan strategis pariwisata dan kawasan pariwisata khusus*.
- ▶ a. Akademis: substansi dan metode
- ▶ b. ideologi dan kepentingan partai politik dan industri yang ada di belakangnya

Masalah 2

- ▶ *Kedua*, kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan belum dapat dijalankan secara keseluruhan, sebagai contoh adanya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah perihal penetapan suatu daerah menjadi Daerah Pariwisata Nasional (DPN) atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), karena dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria atau batasan dalam proses penentuan.
- ▶ 1. Ripparnas sering dijabarkan dalam Ripparda, konteks yang berbeda, SDM, sosialisasi yang tidak dibuat, dan penyusunannya lebih bersifat topdown daripada bottom-up, otonomi daerah dalam bidang pariwisata
- ▶ 2. Dana

Masalah 3

- ▶ *Ketiga*, sumber daya manusia kepariwisataan yang masih kurang dikembangkan secara optimal, pelaku usaha industri pariwisata yang masih ada yang kurang menganggap penting adanya sertifikasi usaha pariwisata, dan belum adanya pengaturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- ▶ Sertifikasi usaha pariwisata, ini sangat penting: CHSE

Masalah 4:

- ▶ Permasalahan lain pada aspek regulasi dan kebijakan yaitu komitmen dan kepemimpinan serta kemauan politik yang diwujudkan dalam RPJMD untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas relatif masih rendah, tata ruang dan penggunaan/pemanfaatan lahan yang sering menghambat investasi di sektor pariwisata dan berpotensi memunculkan konflik, usaha di sektor pariwisata yang sering menjadi keluhan pelaku usaha di sektor pariwisata karena proses yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, serta dukungan pendanaan pemerintah yang relatif masih rendah untuk program pengembangan pariwisata merupakan permasalahan lain disektor pariwisata.
- ▶ Pergantian Pemda dan personalia ketidakberlanjutan kebijakan
- ▶ Pariwisata sebuah industri, ia sebuah kue, seorang gadis manis, yang menjadi rebutan, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, BPOLF. Perlu dibuat dengan jelas TUPOKSI dan wewenangnya

Masalah 5: Dampak nonekonomis

Pariwisata perlu dipandang sebagai salah satu sektor yang berpengaruh pada kondisi sosio-ekonomi dari pelaku pariwisata, sehingga dalam menghitung dampak atau *multiplier effect* pariwisata tidak lagi hanya mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga semua manfaat sosiologis dan psikologisnya terutama bagi wisatawan selaku konsumen. Adanya perkembangan pariwisata dari wisata massal lalu muncul minat khusus menggambarkan adanya pergeseran peranan pariwisata sebagai industri berbasis pengalaman dan mengutamakan output berwisata yaitu peningkatan kualitas hidup.

Masalah 6

- ▶ Secara global permasalahan pembangunan kepariwisataan yang mengemuka yaitu pelaksanaan pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism*. Pariwisata berkelanjutan menurut United NationWorld *environment and host communities*, (pariwisata yang sangat memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, di saat ini dan yang akan datang, dengan mengutamakan kebutuhan komunitas pengunjung, industri, lingkungan, dan tuan rumah atau masyarakat sekitar objek wisata). Lebih lanjut menurut UN-WTO, terkait dengan kebudayaan maka pariwisata berkelanjutan harus menghargai keautentikan sosial dan budaya masyarakat sekitar objek wisata, menjaga warisan budaya dan nilai tradisi yang ada, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan toleransi lintas budaya.
- ▶ Salah satu modal utama pariwisata adalah alam, lingkungan

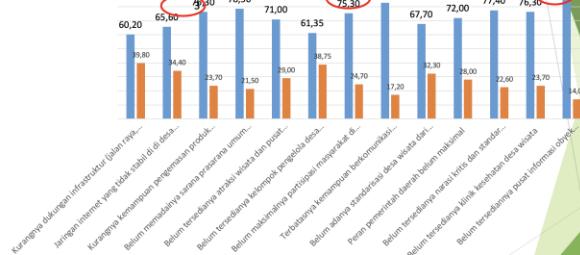
Masalah pariwisata dalam perspektif budaya Lokal Manggarai

- ▶ Ciri meka (menjadi tamu): Long ata lonto, lonto ata long, Labuan Bajo adalah (alienasi masyarakat lokalnya dan budaya, nama tempat
- ▶ Meka porong/meka toko : wisatawan yang datang hanya melihat, dan pulang
- ▶ Ka'eng meka : tamu yang menetap, dan menguasai
- ▶ Meka ka'eng : tamu yang mencari kesenangan, asal-asalan
- ▶ Tiba meka: persaudaraan hsopitalitas
- ▶ Mose meka: dunia ini adalah tempat wisata sebelum kita memasuki. Pariwisata ziarah mengendus jejak Allah lewat alam, budaya, dan perjumpaan dengan sesama sebagai saudara dan sahabat

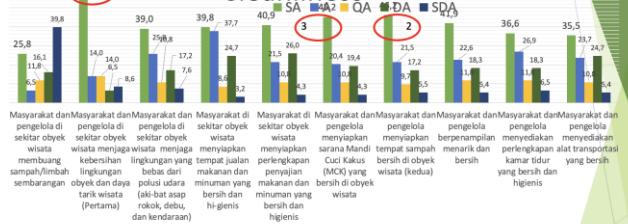
Tantangan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis CHSE pasca COVID-19

■ YES

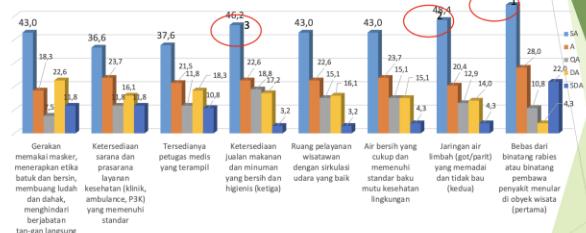
■ NO



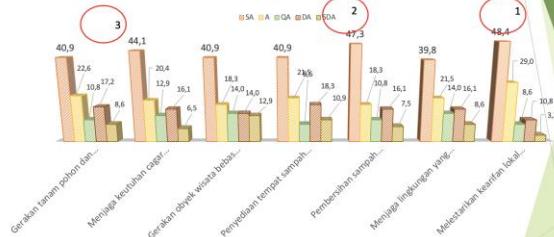
Cleanliness



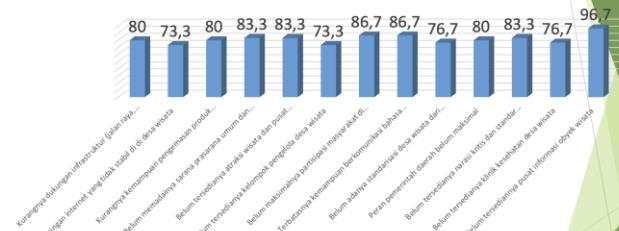
Health



ENVIRONMENT



Tantangan Pengelolaan Desa wisata di Mabar (%)



Pariwisata Holistik dan Integral

- ▶ Segala hal dan semua orang
- ▶ Semua dimensi hidup
- ▶ Semua perspektif
- ▶ Semua relasi
- ▶ Pentahelix

7 prinsip ramah.... Sapta Ramah



7 prinsip ramah.... Sapta Ramah

- ❖ *Ramah martabat manusia*
- ❖ *Ramah sesama: masyarakat local, wisatawan,*
- ❖ *Ramah budaya local*
- ❖ *Ramah lingkungan (ekologi)*
- ❖ *Ramah nilai etis-religius,*
- ❖ *Ramah nilai keadilan, Kerjasama, transparasi dan kejujuran*
- ❖ *Ramah Iptek yang manusiawi*

YOUTH'S ACTION : Pengukuran Budaya Lokal untuk Pariwisata Holistik

Tuesday, 19
March 2024

7A Dimensi Operasional (Manajerial)

- ❖ atraksi (*attraction*): alam, budaya, rohani
- ❖ aktitivitas (*activity*): what to see, what to buy, what to do, what kind the memory
- ❖ aksesibilitas (*accessibility*)
- ❖ amenitas (*amenity*),
- ❖ akomodasi (*accommodation*) dan
- ❖ *ansiliaritas (ancillary, awareness, hospitality): imus caru isung, tawa caru ranga, sikap penuh perhatian, sikap tanggap*
- ❖ Akselerasi

YOUTH'S ACTION : Pengukuran Budaya Lokal untuk Pariwisata Holistik

Tuesday, 19
March 2024

UNIKA Santu Paulus

- ▶ Mou dengan Kemparekraf tahun 2020
- ▶ Membantu dikeluarkannya SK (Perda) tentang Dewasa Wisata
- ▶ Pendampingan Desa Wisata : Desa Meler, Kelurahan Wali
- ▶ FGD tentang Kebudayaan dengan pemangku adat: dalam rangka pendampingan
- ▶ Pendampingan mahasiswa untuk melek pariwisata: seminar, lokakarya, dan pembentukan
- ▶ Bekerjasama dengan pemerintah tiga kabupaten untuk mengembangkan pariwisata. Salah satunya yang cukup berpengaruh terkait penguatan kebudayaan lokal,
- ▶ Mengadakan penelitian dan PkM terkait dengan kebudayaan. Isu-isu tentang penyakit, tentang hewan, bencana alam, dll.
- ▶ Mengundang pelaku pariwisata untuk mengadakan seminar dan lokakarya: etika pariwisata,
- ▶ Terlibat dalam pembuatan Tagline Kabupaten Manggarai: Manggarai The Land of harmony
- ▶ Bekerja sama dengan pelaku pariwisata: HPI, ASITA, PHRI, Asosiasi Perkapalan, dll.

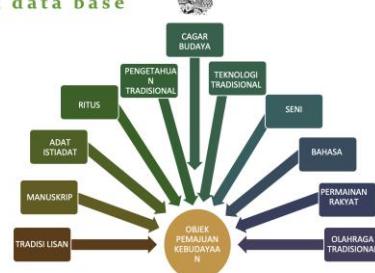
V Penguatan Budaya Lokal

- ▶ 4.1 Data Obyek Pemajuan Kebudayaan (UU No. 5 2017)
 - ▶ 1 Manuskrip
 - ▶ 2. Tradisi Lisan
 - ▶ 3. Adat-istiadat
 - ▶ 4 Ritus
 - ▶ 5 Pengetahuan Tradisional
 - ▶ 6 Teknologi Tradisional
 - ▶ 7 Seni
 - ▶ 8 Bahasa
 - ▶ 9 Permainan Rakyat
 - ▶ 10 Olah Raga Tradisional
 - ▶ 11 Cagar Budaya

YOUTH'S ACTION : Penguatan Budaya Lokal untuk Pariwisata Holistik

Tuesday, 19
March 2024

**UNSUR
KEBUDAYAAN:
titik data base**



**UNSUR
KEBUDAYAAN:
titik data base**



Ru	Wengke one/pali one	Wengke pe'ang/pali pe'ang
Mbaru (Rumah Gendang)	Lepa/boa (pekuburan, makam)	
Beo/golo (Kampung)	Poco/puar	
Compang (natas)	Wae/ngalor/sano	
Uma	Satar	
Wae teku	Tacik/Nanga (Pantai)	

Sketsa Mbaru Gendang





Hidup itu gelap penuh tantangan, dosa, dan misteri karena itu perlu kerja keras, refleksi, bertobat

Dengan itu kita akan melihat tiga jalan: budi/kepala (sa'i), hati (nai), dan jalan Tuhan (Mori Keraeng)

Caci: Puncak kesenian orang Manggarai dan sebuah teater kehidupan



□ Caci
Puncak dan pusat kesenian orang Manggarai
sebuah teater kehidupan
Permainan sekaligus tarian

□ Simbol:
✓ Perisai: bumi, ibu bumi;
✓ agang: langit, bapa langit
✓ Kalus: tantangan hidup, beban hidup,
kekerasan, kejahatan, iblis
✓ Peganglah (hormatiullah, sembahlah)
langit dan bumi (Tuhan) supaya Anda
dapat mengatasi masalah hidup atau
supaya jauh dari kejahanatan dan setan
(kalus)

Ritus-ritus (religi): yang tradisional dan yang kristiani

- Manggarai adalah rumah bhinneka: dialog, inklusivitas, keterbukaan terhadap yang lain
- Fakta sosial, historis, dan kultural: banyak biara
- Di Larantuka ada semana santa, di Manggarai ada festival/prosesi rosario, patung Bunda Maria, Sakramen Mahakudus, dll.
- Sebuah spiritualitas terbuka, inklusif dan universal

Gereja St. Yosef - Ruteng



Acara Adat Roko Molas Poco



Gereja Kristus Raja Pagal



Kerangka Pelestarian Budaya Lokal ke Depan

- ▶ Kerangkapengembangan kebudayaan:
- ▶ Budaya adalah kunci hermeneutic
- ▶ Formatilisasi
- ▶ Transformasi
- ▶ Transubstansi

YOUTH'S ACTION : Pengaitan Budaya Lokal untuk Perkembangan Holistik

Tuesday, 19
March 2024

Perarakan Minggu Palma di Ruteng



Gua Maria Golo Curu



Kontekstualisasi Budaya



RUU Kepariwisataan

- ▶ Pasal 1, wisata online, wisata elektronik yang sering dilakukan pada saat Covid-19
- ▶ Pentahelix dimasukkan dalam pasal 1
- ▶ Pasal 2 : asas dan tujuan: (1) pariwisata holistic-integral : pariwisata terbuka kepada semua hal dan semua orang, semua dimensi hidup (2) asas ekologis-berkelanjutan (sustainable tourism, tourism and green investement)
- ▶ Pasal 3: tujuan pariwisata, pelestarian alam dan budaya lokal dan nasional (pasal 6). Soal istilah, lingkungan hidup =ekologis
- ▶ Pasal 4/Pasal 16 : Daya Tarik wisata= 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (UU no. 5, 2017). Sinergitas

RUU Pariwisata

- ▶ Pasal 17 : usaha pariwisata, belum berpihak pada masyarakat lokal, pemerintah mendampingi atau memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha-usaha terkait dengan budaya
- ▶ Pasal 23: 7A, aksesibilitas,

Pertanyaan

- ▶ Supaya menarik: omong panjang lebar, mengejar, menjual
- ▶ Wisata budaya: Gunung Ranaka,
- ▶ BEM, Rian: Labuan Bajo: Kebutuhan strategi, pihak pemerintah : SDA, SDM,
- ▶ Pa Hiro: Refleksi dan ekspektasi, kecemasan pembangunan, keputusan destinasi wisata sebagai industri, amdal, bersamaan
- ▶ Bayu: Oktovianus : Caci, paradoks, pantai,
- ▶ Trisno:

B. SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan

1. Bapak Trianda Gomez (pengusaha sektor pariwisata)

Saat ini Wae Rebo menjadi destinasi pariwisata di Ruteng, apakah sudah ada penetapan berapa target jumlah kunjungan wisatawan lalu dari mana saja wisatawan tersebut? Kondisi infrastruktur untuk mencapai Wae Rebo sangat tidak layak, wisatawan terutama perempuan pasti akan berpikir ulang kalau hendak datang ke sana, untuk itu harus ada pihak yang memperhatikan dan bertanggung jawab membangun infrastruktur menuju Wae Rebo. Siapa yang bertanggungjawab dalam perbaikan infrastruktur ke Wae Rebo? Apakah bisa membangun infrastruktur jalan alternatif menuju Wae Rebo?

2. Anro (Ketua BEM Unika Santu Paulus Ruteng)

Terinspirasi dari film “*Dragon for Sale*” saat ini di Bajo yang terjadi adalah banyak orang asing yang mengambil air milik rakyat. Masyarakat di Kepulauan Labuan Bajo tertindas karena masifnya pembangunan di Labuan Bajo termasuk hotel yang membutuhkan banyak air. Penduduk tertindas karena kekurangan air. Bagaimana langkah strategis dari DPR terhadap hal tersebut?

3. Dr. Hiro (Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Unika Santu Paulus Ruteng)

Bagaimana keputusan penetapan pembangunan suatu destinasi pariwisata selama ini? Dikhawatirkan yang selama ini terjadi dilakukan tanpa kajian (AMDAL) terlebih dahulu? Atau dibangun beriringan dengan diprosesnya AMDAL? Refleksi kritis untuk pengembangan pariwisata ke depan, idelanya AMDAL dulu baru ambil keputusan pengembangan. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam penyusunan revisi UU Kepariwisataan ini.

4. Bayu (Mahasiswa Unika Santu Paulus Ruteng)

Berdasarkan paparan narasumber Ibu Kuntari, setiap pelaku atau perusahaan pariwisata wajib mendapatkan izin. Kendala di Indonesia, pelaku pariwisata, terutama masyarakat kecil, ketika mau mencari izin sangat sulit. Selama ini tampaknya pemasukan yang diperoleh negara hanya dirasakan oleh pejabat negara. Mimpi besar pariwisata menambah pemasukan negara, masyarakat kecil jarang mendapatkan manfaat dari pemasukan negara. Ini kontradiktif dengan pariwisata berkualitas.

Pertanyaan untuk Romo Max mengapa tarian Caci hanya boleh dilakukan oleh laki-laki? Apakah mungkin ditarikan oleh perempuan?

5. Prikso (Mahasiswa TeologiUnika Santu Paulus Ruteng)

Ditujukan kepada Bapak Frans Teguh

Apa yang terjadi di Labuan Bajo, kita tidak boleh lupa dengan hak-hak masyarakat yang terancam, seperti hak atas hidupnya. Ketika misalnya masyarakat Labuan Bajo, petani jadi nelayan dan ke laut, mereka dipaksa jadi nelayan karena ada parwisata. Kemudian mereka jadi penjual souvenir karena di laut akan mengganggu parwisata. Masyarakat lokal di tempat pariwisata menjadi ketakutan. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Jawaban

Kuntari, S.H., M.H

1. Atas pertanyaan Bapak Gomez, infrastruktur memang menjadi kendala utama yang dialami daerah dan sangat tergantung pada kemampuan anggaran, namun saat ini yang berkembang justru wisatawan sangat berminat mengunjungi objek pariwisata berkualitas atau minat khusus dengan *tracking* yang sulit sebagai salah satu tantangannya. Kesulitan pencapaian ke suatu destinasi menjadi ketertarikan utama demi mendapatkan kepuasan tersendiri dengan tujuan menikmati keindahan budaya yang ada di objek yang dituju, dalam hal ini Wae Rebo salah satunya.
2. Menjawab pertanyaan Adik Anro, berdasarkan hasil kajian anggaran yang telah kami lakukan atas 5 destinasi pariwisata, memang benar dampak negatif yang terjadi di Bajo pasca ditetapkan sebagai destinasi pariwisata premium yaitu sanitasi dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat sekitar. Untuk

itu kami sedang berupaya untuk mendorong bagaimana pengaturan tata ruang di wilayah destinasi pariwisata, termasuk pengelolaan sumber air dan sanitasi, harus sesuai dengan desain perencanaan yang telah dibuat dan sesuai AMDAL.

3. Terkait perizinan bagi pelaku pariwisata, kami sangat kagum dengan Turki, untuk itu dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan kami akan berupaya untuk mengatur perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan orientasi kemudahan berusaha.

Dr. Maksimus Regus, S.Fil, M.Si

1. Narasi budaya harus dapat menyatu dengan budaya.
2. Ada beberapa pendekatan, yaitu:
 - a. penguatan “kekuatan karakter lokal” yang harus dibarengi dengan kebijakan;
 - b. promosi kebudayaan; dan
 - c. investasi, perlunya sumber pendanaan dan kejelasan kemana dana yang diperoleh.
3. Perlu ada jembatan penjumba dialog budaya.
4. Narasi budaya lokal harus lebih banyak daripada narasi besar.

Dr. Frans Teguh, MA.

1. Pariwisata harus dipahami sebagai milik bersama, *every body doing this business*, maka ke depan perlu:
 - a. konsistensi;

- b. harmoni;
 - c. *high of quality life*;
 - d. mengeliminir gangguan berupa kriminalisasi;
 - e. dialog tentang kearifan lokal supaya tidak miskin diskusi dalam memahami nilai-nilai lokal;
 - f. tidak *single community* melainkan harus *multi community* karena kita berbicara tentang kehidupan. DNA dari pariwisata yaitu cari yang unik, autentik, dan kelokalan yang semuanya menjadi esensi dari kebudayaan; dan
 - g. terkait pertanyaan pariwisata sebagai narasi, promosi pada kenyataannya perlu diperkuat terhadap produk yaitu berupa pengalaman yang dirasakan wisatawan ketika datang di suatu tempat. Produk yang dimaknai tidak dibawa secara fisik, tetapi perlu dinarasikan sebagai *experience*.
2. Kita sepaham bahwa pariwisata sebagai *value added* bagi suatu budaya.

C. DOKUMENTASI KEGIATAN







